

Industri Gula di Kabupaten Kendal Pada Masa Kolonial

ISBN 978-979-17075-6-5

Kipas

Rachmat Susatyo

INDUSTRI GULA DI KABUPATEN KENDAL
PADA MASA KOLONIAL

Rachmat Susatyo

Koperasi Ilmu Pengetahuan Sosial

2007

KATA PENGANTAR

Di Jawa, gula sudah dikenal oleh masyarakat jauh sebelum kedatangan bangsa Belanda. Namun pembuatannya masih dilakukan secara tradisional, dan diusahakan dalam industri rumahan (*home industry*). Karena gula merupakan komoditas perdagangan sangat yang menguntungkan di pasaran dunia, pemerintah kolonial Belanda membuka peluang usaha bagi para pemilik modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Mengingat tebu yang menjadi bahan dasar pembuatan gula sangat cocok di tanam di lahan persawahan, maka para investor lebih tertarik menanamkan modalnya di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan, karena Pulau Jawa adalah satu-satunya pulau yang paling banyak memiliki areal persawahan dibandingkan dengan pulau lain di Indonesia.

Berbagai sarana dan prasarana perkebunan besar dengan pabrik gulanya kemudian berdiri di berbagai daerah di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, dari Banten sampai Jawa Timur. Gula kemudian menjadi komoditi ekspor Hindia Belanda, dan Pulau Jawa mendapat keuntungan dari industri ini. Trans-

portasi kereta api dan jalan raya kemudian tumbuh kembang dengan pesatnya di Jawa.

Jika kolonisasi Belanda dengan perusahaan asing umumnya banyak merugikan kepentingan pribumi, maka industri gula dengan perkebunan tebunya ternyata justru banyak memberikan manfaat bagi penduduk yang terlibat dalam mata rantai industri gula. Industri gula dan perkebunan tebunya, telah membuka kesempatan kerja yang luas bagi penduduk desa yang umumnya para petani.

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengungkapkan, sejauh mana pengaruh itu, utamanya bagi kehidupan sosial ekonomi penduduk desa di Kabupaten Kendal yang daerahnya menjadi salah satu kawasan perkebunan. Namun demikian tulisan ini tentunya masih terdapat kekurangan. Sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun, sangat penulis harapkan.

Bandung
Desember 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	
GAMBARAN UMUM KEADAAN DAERAH DAN PENDUDUK KABUPATEN KENDAL	1
1.1 Letak Geografi dan Keadaan Alam	1
1.2 Awal industri Gula di Jawa	5
BAB II	
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL DAN INDUSTRI GULA DI KENDAL	13
2.1 Arah Kebijakan Baru Pemerintah Kolonial ...	13
2.2 Industri Gula di Kabupaten Kendal	26
BAB III	
PENGARUH INDUSTRI GULA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL-EKONOMI MASYARA- KAT	55
3.1 Kehidupan Sosial-Ekonomi	55
3.2 Penguasaan dan Pemilikan Tanah	65
3.3 Upah dan Ketenagakerjaan	72
3.4 Sarana dan Prasarana Transportasi	87
BAB IV KESIMPULAN	95
DAFTAR SUMBER	102

BAB I GAMBARAN UMUM KEADAAN DAERAH DAN PENDUDUK KABUPATEN KENDAL

1.1 Letak Geografi dan Keadaan Alam

Kabupaten Kendal merupakan salah satu wilayah Karesidenan Semarang. Kabupaten ini terletak di sebelah barat Kota Semarang, dengan batas-batas wilayahnya: di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah barat dengan Karesidenan Pekalongan, di sebelah timur dengan Kabupaten Semarang, dan di sebelah selatan dengan Karesidenan Kedu.¹

Sebelum tahun 1853, di Kabupaten Kendal terdapat tujuh distrik, yang masing-masing terdiri dari beberapa desa. Ketujuh distrik itu ialah: Kendal, Truka, Perbuan, Kaliwungu, Selokaton, Cangkiran, dan Limbangan. Jumlah desa dari tiap distrik dari tahun 1837 sampai 1845 mengalami perubahan, berupa penambahan atau pengurangan. Pada tahun 1837 distrik Ken-

¹ Djoko Suryo, *Social and Economic Life in Rural Semarang Under Colonial Rule in The Later 19th Century* (Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy at Monash University, December 1982). Hlm. 354.

dal terdiri dari 102 desa, kemudian pada tahun 1845 jumlahnya bertambah menjadi 107 desa. Distrik Truka pada tahun 1837 terdiri dari 129 desa, pada tahun 1845 bertambah menjadi 156 desa. Distrik Perbuan dari 111 desa pada tahun 1837, telah berkurang menjadi 83 desa pada tahun 1845. Distrik Kaliwungu pada tahun 1837 terdiri dari 132 desa, pada tahun 1845 berkurang menjadi 102 desa. Distrik Selokaton pada tahun 1837 terdiri dari 107 desa, pada tahun 1845 bertambah menjadi 164 desa. Distrik Cangkiran pada tahun 1837 terdiri dari 40 desa, pada tahun 1845 menjadi 55 desa. Distrik Limbangan pada tahun 1837 terdiri dari 42 desa, pada tahun 1845 menjadi 54 buah desa. Untuk jelasnya dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

Tabel I : Perubahan Jumlah Desa dalam Distrik-Distrik di Kabupaten Kendal (1837 dan 1845)

Distrik	Jumlah Desa 1837	Jumlah Desa 1845	Perubahan (X)
Kendal	102	107	1.05
Truka	129	156	1.21
Perbuan	111	83	0.73
Kaliwungu	132	103	0.78
Selokaton	107	164	1.53
Cangkiran	40	55	1.38
Limbangan	42	54	1.29
Seluruh Kabupaten	667	722	1.33

Sumber : Djoko Suryo, *Social and Economic Life in Rural Semarang Under Colonial Rule in The Later 19th Century* (Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy at Monash University, December 1982). hlm.11.

Topografi Kabupaten Kendal terdiri dari dua dataran, dataran rendah di sebelah utara dan pegunungan di sebelah selatan. Daerah dataran rendah ditanami tanaman pangan, terutama padi; sedangkan daerah pegunungan dengan jenis tanaman keras, terutama kopi. Pegunungan ini merupakan rangkaian perbukitan yang memanjang dari daerah Pekalongan. Di daerah yang memiliki ketinggian antara 300 sampai 400 meter ini, terdapat hutan jati dan juga tanah yang belum diolah. Ada bagian pegunungan yang merupakan perbukitan yang sampai ke laut, dan mempunyai kecuraman yang besar. Pantai yang curam ini masih berhutan, dahulu hutannya lebih besar dan disebut hutan Weleri sesuai dengan nama desa di dekatnya.²

Pada awal tahun 1900-an luas hutan jati yang termasuk Kesatuan Pemangku Hutan (*houtvesterij*) Kendal Sekitar 12.800 hektar. Penebangan kayunya waktu itu dilakukan oleh kontraktor-kontraktor swasta, tetapi bila kontraknya sudah habis, penebangan dilakukan oleh Tempat Pengumpulan Kayu (TPK) di Kaliwungu, Mangkang dan Pegandon.³

Pada masa Sistem Tanam Paksa diterapkan di Jawa Kabupaten Kendal merupakan satu-satunya daerah di Karesidenan Semarang yang ditanami tebu perkebunan pemerintah. Selain tebu tanaman perkebunan lainnya adalah kopi dan nila.⁴ Sesudah Sistem Tanam Paksa dihapuskan, di daerah Kendal Selatan, banyak perkebunan swasta untuk ekspor, seperti karet, kopi, teh, kina, cacao, lada, pala dan panili. Tenaga kerja dari

² P.J. Veth, *Java: Geographisch, Ethnographisch, Historisch*, (Cetakan II, Jilid III, Harlem: De Erven F. Bohn, 1912), hlm. 458.

³ Memori Residen Semarang, *Memori Serah Jabatan 1921-1930*, (Arsip Nasional, Jakarta: 1977), hlm.LI.

⁴ Djoko Suryo, Op. Cit., hlm. XVIII.

perkebunan ini cukup banyak yang berasal dari daerah sekitarnya.⁵

Selain oleh perkebunan swasta hasil bumi untuk perdagangan juga diusahakan oleh penduduk pribumi. Hasil bumi yang diusahakan terutama ialah tembakau dan kopi. Tembakau ditanam di distrik Kendal, Weleri dan Selokaton. Luas tanaman seluruhnya, pada awal tahun 1900-an mencapai sekitar 5000 hektar. Adapun tanaman kopi penduduk, selain ditanam di kebun atau tanah pekarangan, banyak pula yang ditanam di tanah bekas kebun kopi pemerintah yang sudah dihapuskan, dan diberikan kepada penduduk. Kebun kopi itu masih ada yang terus diusahakan, tetapi ada juga yang dibongkar dan tanah dijadikan areal persawahan atau *tegalan*.⁶ Di daerah rendah, selain untuk areal pertanian, juga diusahakan untuk budidaya ikan, khususnya di sepanjang pantainya.

Di Kabupaten Kendal, selain terdapat pegunungan, juga terdapat sungai-sungai. Di antaranya, yang terpenting adalah: Kali Loning, Kali Lotut, Kali Logung, dan Kali Bodri; semuanya bermuara di Laut Jawa. Kali Loning yang mengalir di Distrik Kaliwungu, sering menimbulkan bencana banjir.⁷ Di antara sungai-sungai yang ada, Kali Bodri pernah menjadi salah satu sungai yang baik untuk pelayaran. Kali yang mengalir di Distrik Kendal ini, merupakan gabungan Kali Logung dan Kali Lotut. Keduanya bermata air di Distrik Candiroto, Residensi Kedu; tepatnya di Timur Laut Lereng Gunung Prau.⁸

⁵ Memori Residen Semarang, *Op. Cit.*, hlm. XLIII.

⁶ *Ibid.*, hlm. XLII.

⁷ *Ibid.*, hlm. XLIV.

⁸ *Encyclopedie van Nederlandcshe-Indie* (ENI) (Jilid I, Cetakan II, s'-Grevenhage: Martinus Nijhoff., 1917), hlm.320.

Pada masa Sistem Tanam Paksa, Kali Bodri digunakan untuk jalur pengangkutan gula yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Kendal, khususnya Cepiring, karena kali ini mengalir hanya beberapa meter dari pabrik gula tersebut. Selain Pabrik Gula Cepiring, yang terletak di Distrik kendal, di Kabupaten ini masih terdapat tiga buah pabrik lagi, yang masing-masing terdapat di Distrik Kaliwungu, Truka dan Pegandan.⁹ Akan tetapi, sekitar tahun 1900-an tinggal pabrik gula Cepiring, Gemuh dan Kaliwungu yang masih beroperasi. Diantara ketiga pabrik ini, yang paling baik adalah pabrik gula Cepiring. Pabrik ini pada waktu itu tergolong paling "modern" dan lengkapannya paling baik untuk seluruh Jawa. Pabrik gula Cepiring dan Gemuh, pemiliknya ialah *N.V. tot Exploitatie de Kendalesche Suikerfabrieken*. Pabrik gula Kaliwungu pemiliknya *N.V. Culturomdeeming "Kaliwungu-Plantaran"*, yang penjualan produknya dilakukan oleh *Cultuurmaatschapij der Vordtenlanden*. Pabrik gula Kaliwungu keadaannya tidak sebaik pabrik gula Cepiring dan Gemuh, selain itu instalasinya juga sudah usang.¹⁰ Namun demikian, keempat pabrik ini mempunyai peran yang cukup besar dalam meningkatkan ekspor gula dari Hindia Belanda, terutama pada masa Sistem Tanam Paksa.

1.2 Awal Industri Gula di Jawa

Dari beberapa sumber dapat dipastikan bahwa pembuatan gula tebu di Jawa sudah tua, tetapi usaha itu bukanlah merupakan suatu perusahaan. Pembuatan gula pada waktu itu masih merupakan usaha rakyat

⁹ Lihat Djoko Suryo., *op. cit.*, hlm.25.

¹⁰ Memori Residen Semarang, *op.cit.*, hlm. XLV.

yang masih bersifat merupakan kerumahtanggaan (*home insutry*) dan dikerjakan dengan alat-alat tradisional yang sederhana. Hal ini sesuai dengan struktur kehidupan ekonomi Jawa, yang sampai kurang lebih pertengahan abad ke-19 masih merupakan kehidupan *in natura* dengan sistem kerumahtanggaan yang tertutup. Meskipun di daerah pantai utara sejak lama sudah ada perdagangan yang bersifat internasional, akan tetapi hal itu tidak begitu berpengaruh terhadap sistem kehidupan ekonomi petani sebagai keseluruhan.¹¹

Tebu ditanam di Jawa sejak zaman dahulu, dan mungkin dibawa oleh orang-orang Hindu (India-pen) atau Arab. Kedatangan orang-orang Belanda ke Jawa masih belum membicarakan usaha gula. Akan tetapi, ketika perdagangan gula dari Cina, Siam, Formosa, dan Benggalen (India) menghasilkan keuntungan besar, sedangkan produksi gulanya tidak dapat memenuhi permintaan pasar. Maka Kumpeni memutuskannya membawa dari luar negeri mesin-mesin penggilingan tebu di daerah-daerah sekitar Batavia.¹²

Pemilik pabrik biasanya orang Cina, dan Kumpeni membeli seluruh produksi dengan harga yang ditetapkan. Akan tetapi Kumpeni berkali-kali mengubah perjanjian mengenai banyaknya produksi yang harus diserahkan, serta harganya. Hal ini mengakibatkan keadaan industri gula tidak menentu. Baik jum-

¹¹ Suharjo Hatmosuprobo, 'Pabrik-pabrik Gula di Jawa pada Abad-19: Suatu Studi praliminer tentang timbulnya hubungan kerja bebas', dalam: P.J. Suwarno dkk., *Sejarah Indonesia dalam Monografi* (Yogyakarta: Jurusan Sejarah & Geografi IKIP Sanata Dharma, 1980), hlm. 70-71.

¹² *Encyclopaedie van Nederlandsche-Indie* (ENI), (Jilid IV, s'-Grevenhage: Martinus Nijhoff, 1920), hlm.177.

lah pabriknya, maupun produksinya berubah setiap tahun.¹³

Pembuatan gula di Jawa, sebagai suatu perusahaan timbul pada bagian pertama abad ke-17 (1637). Perusahaan ini didirikan oleh orang-orang Cina di sekitar kota Batavia. Perusahaan-perusahaan ini sebagian besar mendapat modal dari Kumpeni, oleh karena itu produknya terutama untuk memenuhi kebutuhan Kumpeni. Cina-cina itu adalah pemilik penggilingan dan yang mengusahakan penanaman tebunya di sekitar kota Batavia. Tenaga kerja yang dipergunakan, adalah tenaga kerja budak atau tenaga upahan yang berasal dari luar daerah. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan gula ini berada di luar struktur kehidupan ekonomi rakyat Jawa.¹⁴

Sebelum dikenalnya pembuatan gula dari tebu sebenarnya masyarakat di Jawa sudah mengenal pembuatan gula dari bahan lain. Pembuatan gula dengan menguapkan cairan yang disadap dari tangkai bunga pohon kelapa, adalah proses yang sudah dikenal sejak lama. Cairan yang diuapkan itu didinginkan dalam cetakan, dibiarkan membeku dan gulapun siap dipakai. Akan tetapi, cara ini tidak pernah berkembang sampai dapat membuat gula kristal murni. Gula yang dibuat di lingkungan rumahtangga ini biasa dikenal sebagai "gula mangkok", atau dinamakan menurut jenis bahan yang dipergunakannya. Gula mangkok, sampai sekarang merupakan jenis gula yang tetap digemari orang. Sesudah gula tebu dikenal, gula mangkok lebih banyak dibuat dari sari tebu.¹⁵

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Suharjo Hatmosuprobo, *op.cit.*, hlm. 71.

¹⁵ Pieter Cruetzberg dan J.T.M van Lennen (eds), *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 145.

Sampai sekarang, di Jawa, khususnya di wilayah Karesidenan Semarang, gula selain dibuat dari sadapan bunga kelapa, juga dibuat dari sadapan bunga *aren* atau enau dan biasa disebut dengan "*gula aren*". Mengingat *aren* dan terutama kelapa merupakan tanaman rakyat yang banyak tumbuh di halaman rumah ataupun di kebun mereka, diperkirakan gula dari kedua jenis bahan ini sudah dikenal sejak lama sebelum dikenalnya gula tebu.

Sejak awal pengenalan pabrik gula oleh imigran Cina pada permulaan abad ke-17 sampai tahun 1828, satu-satunya teknik yang digunakan adalah teknik tradisional Cina yang berkapasitas kecil. Teknik tradisional Cina menggunakan batu giling yang besar dengan silinder kayu atau batu yang berdiri vertikal. Gerak memutar dilakukan dengan memanfaatkan tenaga kerbau atau manusia, atau gabungan keduanya. Sari tebu yang terperas dimasak pada tungku dalam kancah terbuka. Sirupnya dijual di pasaran dalam negeri, dan gula kasarnya di ekspor oleh VOC (*Vereniging Oost Indische Compagnie*).¹⁶

Pada pertengahan abad ke-17 terdapat dua daerah gula yang penting, yakni Batavia, Jepara, dan Kudus. Pada umumnya di Jepara dan Kudus diusahakan oleh Cina. Produksi gulanyapun juga diperuntukkan memenuhi keperluan Kumpeni. Pada tahun 1677 diadakan persetujuan antara Kumpeni dengan Susuhunan Mataram, yang isinya antara lain menyebutkan adanya kesediaan Susuhunan membantu penyerahan semua produksi gula dari Kudus dan Jepara kepada

¹⁶ *Ibid.*, hlm., 272.

Kumpeni. Dalam persetujuan ini, tidak disebut-sebut daerah Semarang.¹⁷

Menjelang abad ke-18 perusahaan-perusahaan gula diperluas di daerah Cirebon ke Timur (*Java's noord-Ooskust*), karena di daerah ini keadaan tanahnya maupun iklimnya lebih memenuhi syarat untuk penanaman tebu daripada daerah di sekitar Batavia, sehingga akan dapat diperbesar sesuai dengan kebutuhan Kumpeni yang semakin meningkat. Di daerah Cirebon ke Timur ini, sistem produksinya berlainan dengan yang dikerjakan di Batavia. Perusahaan-perusahaan di sini didirikan atas dasar struktur ekonomi tradisional. Statusnya adalah perusahaan pemerintah, sekalipun alat penggiling dan manajemennya diserahkan kepada orang-orang Cina atau orang Belanda swasta. Tebu, kayu bakar dan bahan lainnya, pengangkutan, tenaga kerja di perusahaan, semuanya diperoleh dari para bupati sebagai *kontigenten* ataupun penyerahan wajib dan rodi. Hasil produksi seluruhnya dijual kepada Kumpeni dengan harga yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sistem produksi perusahaan gula ini terus dikembangkan sampai zaman *kultuurstelsel*.¹⁸

Menurut Liem Thian Joe, beberapa penggilingan di daerah Semarang telah didirikan sejak abad ke-18. Dalam pemberontakan Cina tahun 1741 di Semarang, pimpinan pabrik gula dipegang oleh seorang Kapten Cina.¹⁹ Perusahaan-perusahaan di Pantai Timur Laut dan Cirebon berdasarkan atas persewaan desa. Seringkali orang Cina menyewa sebuah desa atau lebih

¹⁷ Djoko Suryo, *Social and Economic Life in Rural Semarang Under Colonial Rule in The Later 19th Century* (Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy at Monash University, December 1982). Hlm.25.

¹⁸ Suhardjo Hatmosuprobo, *op. cit.*, hlm. 71-72.

¹⁹ Djoko Suryo, *op. cit.*, hlm. 25.

untuk tiga tahun, dan menyuruh penduduk desa menanam tebu. Penanaman ini, juga pemotongan tebu dan pekerjaan di penggilingan, dilakukan secara kerja wajib. Penduduk diberi bayaran menurut banyaknya air tebu yang mereka serahkan. Orang-orang Cina itu memberi uang muka untuk pembelian ternak penarik dan bajak, yang nantinya diperhitungkan dengan air tebu. Biasanya orang-orang desa itu selalu mempunyai hutang, sehingga mereka menerima uang hanya sedikit. Pengangkutan dilakukan pedati-pedati mereka sendiri, dan kadang-kadang tebunya digiling di penggilingan penduduk. Selanjutnya, orang-orang Cina itu harus menyerahkan gulanya kepada Kumpeⁿⁱ.²⁰

Mengenai perkembangan perdagangan Kumpeⁿⁱ, dapat digambarkan sebagai berikut: sekalipun harga sering ditekan agar produksi gula tidak melebihi kebutuhan, tetapi produksi terlihat terus menanjak. Pada tahun 1637 produksinya hanya 196 pikul, tetapi pada tahun 1653 sudah meningkat menjadi 12.000 pikul. Pada pertengahan abad ke18 produksi mencapai jumlah maksimum, setelah itu menurun sejalan dengan mundurnya Kumpeⁿⁱ. Akan tetapi, pada tahun 1779 produksinya masih tidak kurang dari 100.000 pikul.²¹ Pertambahan hasil produksi ini sebenarnya disebabkan oleh semakin bertambah luasnya areal tanaman tebu, dan bertambahnya jumlah pabrik penggilingan tebu. Dalam tahun 1710 di tanah pedalaman terdapat 131 pabrik gula. Pemerintah menganggap jumlah ini terlalu banyak dan memutuskan untuk tidak memberikan izin mendirikan pabrik-pabrik baru, sedangkan tiap pabrik ditetapkan setiap tahunnya hanya

²⁰ D.H. Burger, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia* (Jilid I, Cetakan III, Jakarta: Pradnya Paramita, 1962), hlm. 106-107.

²¹ Suhardjo Hatmosuprobo, *op. cit.*, hlm. 72.

memproduksi 300 pikul. Waktu itu diharap adanya pengurangan jumlah pabrik yang ada, tetapi pada tahun 1721 kembali seperti semula. Sekalipun demikian, harapan terpenuhi, yakni dengan adanya kerusakan di daerah pedalaman akibat perang Cina.²²

Pada tahun 1745 tinggal 52 pabrik yang masih produksi, tetapi pada tahun itu juga ditambah 13 buah. Pemerintah mengkhawatirkan produksi gula akan berlebih lagi, menetapkan jumlah pabrik tidak akan lebih dari 70 buah. Pada tahun 1750 diijinkan untuk diperbanyak menjadi 80 buah. Pada pemeriksaan yang dilakukan oleh panitia pengawas pergiliran pada tahun 1767 ternyata terdapat 82 buah, tetapi beberapa buah tidak berproduksi karena kekurangan kayu sebagai bahan bakar. Karena persediaan yang diperlukan setiap tahunnya berkurang, maka pada tahun 1779 tinggal 55 buah. Dua puluh buah milik bangsa Eropa, 26 buah milik Cina, dan 5 buah yang berada di bawah Kumpeni disewakan. Pada tahun 1796, disebabkan karena persoalan yang sama dan juga karena pemerintah membeli gula harga rendah, mengakibatkan beberapa buah pabrik tidak dapat bertahan lama; sehingga hanya tinggal 40 buah pabrik saja meskipun pada tahun 1786 dikeluarkan peraturan wajib menanam tebu. Selama itu, meskipun ada pengurangan beberapa pabrik, gula yang dihasilkan masih mendapat kemajuan produksi, karena rata-rata hasil tiap pabrik meningkat sampai sekarang kurang lebih 1800 pikul.²³

Pada masa kekuasaan VOC, penduduk Cina hampir terdapat di setiap kota di Jawa. Orang-orang Cina ini telah bertindak sebagai pedagang perantara

²² P.J. Veth, *Java: Geographisch, Etnographisch, Historisch*, (Jilid II, Cetakan Kedua, Harlem: De Erven F. Bohn, 1912), hlm. 245.

²³ *Ibid.*, hlm. 245-246.

dalam hubungan dagang antara orang Belanda dengan penduduk pribumi. Disamping itu, orang-orang Cina menjadi penyewa dari hak perpajakan yang disewakan kepada mereka, baik oleh VOC maupun penguasa pribumi, seperti misalnya: pajak-pajak ekspor-impor, pajak kapal, bea pasar, konsesi-konsesi perjudian, pajak pembuatan anggur, perdagangan beras, dan kayu. Penduduk Cina di Semarang semakin makmur, terutama penggilingan tebu, hal ini semakin menarik imigran-imigran Cina untuk datang ke Jawa.²⁴

VOC lahir, pada mulanya dan dasarnya adalah untuk kepentingan ekonomi. Hukum ekonomi VOC mengatakan bahwa dengan modal terbatas untuk memperoleh untung sebesar-besarnya. Caranya adalah, dengan menggunakan sistem penyerahan paksa (*forced delivery*) dan monopoli kekuasaan, perluasan daerah dan pemeliharaan tentara, bukan perluasan negara *qua* negara, tetapi untuk memenuhi tujuan VOC. Atau lebih umum, semangat kolonialisme pada permulaan abad ke-17.²⁵

²⁴ Hartono Kasmadi dan Wiyono (eds), *Sejarah Sosial Kota Semarang (1900-1950)*, (Jakarta: Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi Sejarah Nasional, 1985), hlm. 79-80.

²⁵ Farchan Bulkin, 'Negara Masyarakat dan Ekonomi', dalam *Prisma*, No. 8, 1984, No. XIII, hlm. 9.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL DAN INDUSTRI GULA DI KENDAL

2.1 Arah Kebijakan Baru Pemerintah Kolonial

VOC ternyata tidak bertahan terus, akibat korupsi yang terjadi di perusahaan dagang itu, VOC terpaksa dibubarkan. Setelah pembubaran VOC pada beberapa dasa-warsa abad ke-19, terjadilah kemunduran pasaran gula internasional, sementara produksi gula di Hindia Belanda berlebih. Hal ini terjadi, akibat perang yang timbul antara Inggris dan Perancis, yang juga menghambat perdagangan antara Hindia Belanda dengan negeri Belanda. Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811) tidak melihat prospek masa depan perkebunan tebu. Selanjutnya masa pemerintahannya, produksi gula terus merosot drastis. Kemerossotan ini terutama terjadi setelah penarikan kembali uang muka kepada pengusaha pabrik gula, dan setelah sistem jual paksa yang biasanya menjadi ciri VOC dihapuskan.¹

¹ Pieter Cruetzberg dan J.T.M. van Lannen (eds) , *op. cit*, hlm. 272.

Di daerah pantai utara Jawa, sejak tahun 1808 sudah diadakan larangan untuk memberikan uang muka pada tanaman, kecuali kepada Bupati. Dalam sebuah instruksi untuk bupati di daerah pantai utara Jawa tahun 1808, pasal 31 antara lain berbunyi:

" ... walaupun pemberian uang muka untuk penanaman telah dilarang dengan pengumuman tanggal 14 Juli 1808, namun ada pengecualian bagi para bupati, yang masih harus mengatur supaya sawah-sawah selalu ditaburi benih dan ditanam pada waktunya, dan dalam hal rakyat kecil kekurangan alat dan ternak maupun bibit padi, mereka harus memberikan bantuan dengan penggantian yang layak dan tidak terlalu tinggi".²

Mengenai hak atas tanah, menurut van Vollenhoven, yang paling tua adalah atas dasar hak ulayat dari suku-suku/desa/perserikatan desa. Perubahan-perubahan yang terjadi terutama disebabkan oleh para raja, terutama di daerah kekuasaannya. Perubahan-perubahan tersebut diperkuat dan disebarluaskan oleh pemerintah Belanda, terutama di zaman Daendels.³ Dalam abad ke-19, orang lebih banyak menaati perjanjian-perjanjian sewa tanah daripada perjanjian kerja. Jika seorang petani membutuhkan tenaga bantuan orang lain, maka bantuan yang ia peroleh terutama mempunyai sifat pertolongan. Dalam hal ini, sama sekali tidak ada persetujuan dalam arti perjanjian (hukum) atau kontrak yang dinyatakan secara jelas

² A.M.P.A. Scheltema, *Bagi Hasil di Hindia Belanda* (Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 320.

³ M.M. Billah, Loehoer Widjajanto, Aries Kristyanto, 'Segi Penguasaan tanah dan Dinamika Sosial di Pedesaan Jawa (Tengah)', dalam: Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (eds), *Dua Abad Penguasaan, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa* (Jakarta: P.T. Gramedia, 19984), hlm. 254-255.

dimana hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak ditentukan dengan teliti.⁴

Pada masa Daendels, kewajiban menanam kopi di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur diperluas. Ia juga memerintahkan membuat jalan pos besar dengan kerja rodi yang berat. Jalan pos besar ini juga melalui wilayah Kabupaten Kendal bagian utara, memanjang melintas dari arah barat (Karesidenan Pekalongan), ke timur melalui distrik Weleri-Kendal-Kaliwungu, terus ke Semarang. Jalan ini pada mulanya untuk kepentingan militer, tetapi kemudian menjadi penting untuk perekonomian. Di desa-desa diadakan persetujuan-persetujuan untuk menanam dan memelihara tebu dan menyerahkan pekerja-pekerja dan kayu bakar kepada pengusaha pabrik. Di daerah-daerah yang diperoleh dari raja, penanaman itu dilakukan atas perintah, karena penduduk di daerah ini lebih terbiasa mengikuti perintah kepala.⁵

Sekitar tahun 1800-an, orang menjadi yakin bahwa dengan produksi secara feodal lama, ekspor tidak mungkin naik lebih besar, dan bahwa tanah seharusnya dapat menghasilkan lebih banyak daripada sebelumnya. Kesejahteraan rakyat yang rendah dicari sebabnya dalam kefeodalan. Apabila kesewenangan, paksaan dan tekanan feodal dapat dihapuskan, keinginan rakyat untuk sejahtera diperkirakan akan dapat kebebasan. Jauh sebelumnya, Dirk van Hogendorp pernah menganjurkan supaya masyarakat Jawa dihilangkan kefeodalannya. Menurut pendapatnya, kekuasaan bangsawan harus dibatasi, tirani dan korupsi harus diberantas, dan rakyat perlu memperoleh ke-

⁴ D.H. Burger, *op.cit.* hlm. 93 dan 235.

⁵ *Ibid.*, hlm. 126 dan 185.

pastian hukum dan kemerdekaan pribadi serta hartanya. Pada hakekatnya, hal ini akan dapat meningkatkan produksi untuk ekspor di Jawa yang menguntungkan negeri induk (Belanda).⁶

Semangat "Liberalisme" seperti yang telah dianjurkan oleh Dirk van Hogendorp ini, mendapat "angin segar" baru pada masa pemerintahan Raffles. Raffles yang kemudian menggantikan Daendels, ingin mengadakan kemerdekaan ekonomi dan kepastian hukum bagi penduduk. Dasar pemikirannya ini, merupakan dasar pemikiran liberal dan baru pada masa itu. Ia menghendaki supaya kehidupan ekonomi diberi kebebasan seluas-luasnya, dan supaya pemerintah sedapat mungkin tidak mencampuri urusan ekonomi rakyat, sehingga memberikan kesempatan kepada para pengusaha untuk mengembangkan diri. Menurut pendapat Raffles, pelaksanaan rodi yang selama ini diterapkan dan sangat memberatkan, harus segera dihapuskan. Di beberapa desa biasanya separuh dari penduduknya dipergunakan pemerintah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan wajib, dan separuh lainnya diberi tanah. Pada zaman Kumpeni, bupati-bupati diberi perintah untuk membagi-bagikan tanah dengan semua maksud untuk menghadapi kesulitan yang timbul karena tekanan rodi, dan karena perpindahan petani yang sering terjadi.⁷

Pada masa Raffles pembagian tanah kepada penduduk semakin diperluas. Maksudnya agar semua penduduk menguasai tanah, dan di atas tanah itu penduduk dapat meningkatkan usaha taninya. Lain dari-

⁶ D.H. Burger, *Perubahan-Perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Bhratara, 1977), hlm. 10.

⁷ D.H. Burger, *Sedjarah ... op. cit.*, hlm. 116.

pada itu, campurtangan dalam pemilikan tanah dilakukan dengan maksud agar supaya jumlah pemilik tanah bertambah, sehingga banyaknya pekerja-pekerja wajibpun akan bertambah pula. Kewajiban bekerja dalam perkebunan itu biasanya terikat kepada pemilik tanah dan dengan bertambahnya jumlah pemilik tanah, maka pekerjaan itu akan semakin ringan. Karena itu oleh pemerintah, di daerah-daerah tebu diperintahkan supaya diadakan pembagian tanah-tanah pertanian. Di banyak desa, rakyat membantu pembagian tersebut dengan sukarela. Kadang-kadang, pemilik tanah minta diadakan pembagian kembali, karena mereka harus mengerjakan pekerjaan wajib yang sama beratnya, sedangkan tanah milik mereka sama luasnya. Di tempat lain, orang yang tidak punya tanah, mendesak supaya diadakan pembagian sawah, karena mereka harus melakukan pekerjaan-pekerjaan wajib. Hambatan terhadap pembagian tanah itu jarang terjadi. Perpindahan rakyat akibat tekanan, mempermudah pembagian itu. Di banyak daerah, pembagian tanah pertanian diadakan setiap tahun untuk pemerataan hak-hak dan beban-beban yang berkaitan dengan tanah milik itu, misalnya di Rembang, Madiun, Kediri, Surabaya, dan Pasuruan.⁸

Selain itu, Raffles juga mengeluarkan peraturan baru. Ia menerapkan pajak atas tanah yang dimiliki para petani, yang harus dibayar dalam bentuk uang.⁹ Pembayaran pajak dengan uang, ternyata kemudian dirasakan sangat memberatkan rakyat. Oleh karena itu, kemudian juga diperbolehkan membayarnya dengan

⁸ *Ibid.*, hlm. 142.

⁹ Ongokham, 'Perubahan Sosial di Madiun Selam Abad XIX: Pajak dan Pengaruhnya terhadap Penguasaan Tanah' dalam Soediono M.P. Tjondro-negoro dan Gunawan Wiradi (eds), *op. cit.*, hlm. 17.

barang-barang hasil pertanian (*In Natura*). Sungguhpun demikian, sedikit sekali yang membayarnya dengan barang-barang, kebanyakan dengan uang.¹⁰

Di Cirebon, pemerintah bahkan pernah mencoba memungut padi sebagai ganti pajak, dan mengkontrakkannya kepada penggilingan swasta. Akan tetapi, karena akibatnya sangat buruk, pemungutan padi sebagai pembayar pajak tanah hipun kemudian dicabut. Hampir semua usaha pemungutan pajak oleh pemerintah mengalami kegagalan, kecuali kopi dan tebu.¹¹

Pemungutan pajak dalam bentuk uang yang dirasakan sangat memberatkan penduduk, ternyata memberikan kesempatan baik bagi beberapa orang. Hal ini dengan terbuktinya kesediaan seseorang bupati untuk menanggung pembayaran pajak tanah bagi beberapa desa tertentu, asalkan dia diberi hak untuk mempergunakan tenaga penduduk desa yang bersangkutan untuk kepentingannya. Di Semarang dan Kedu, beberapa desa tidak membayar pajak tanah, tetapi dalam tahun 1818 penduduk desa itu melakukan "pekerjaan rumah" (*huisdiensten*) pada residen-residen, sedangkan para kepala, orang Cina, Arab, dan Eropa, pegawai-pegawai dan orang-orang swasta, dengan membayar pajak tanah penduduk, dapat mempergunakan barang-barang hasil tenaga penduduk sebagai gantinya.¹²

Sebagai akibat dari penarikan pajak tanah dalam bentuk uang, maka hasil rakyat Jawa yang terutama, yaitu padi, berangsur-angsur masuk dalam lalu-lintas

¹⁰ D.H. Burger, *Sedjarah ... op. cit.*, hlm. 142.

¹¹ Clifford Geertz, *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia* (Jakarta: Bhratara, 1983) hlm, 56.

¹² D.H. Burger, *Sedjarah ... op. cit.*, hlm. 143.

kontrak. Berhubung dengan diubahnya penyerahan wajib beras yang dahulu menjadi alat pembayar pajak tanah, maka timbullah dua hal baru dari perbedaan uang, yaitu penjualan barang hasil bumi dan pajak uang. Dengan demikian, penduduk terpaksa mengadakan suatu langkah pertama yang besar menuju "rumah tangga uang". Selain itu, pajak tanah dengan cepat menyebabkan diperbesarnya produksi, karena penduduk terdorong untuk memperluas penanaman palawija yang pendapatannya dipergunakan untuk membayar pajak.¹³

Mengenai berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk meningkatkan pendapatan penduduk, sebenarnya mempunyai tujuan akhir yang sama, yakni meningkatkan pendapatan negara atau pemerintah kolonial itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Alatas bahwa:

"... gagasan kapitalis kolonial tentang pembangunan, sebagian besar didasarkan pada keserakahan untuk memperoleh keuntungan yang tak terhingga dan dapat menanggukkan seluruh kepentingan yang lain....".¹⁴

Sekalipun sudah diadakan pembaruan terutama mengenai pemilikan tanah dan perekonomian bebas, nyatanya sampai tahun 1817 keadaan di Jawa masih seperti yang dilukiskan oleh Thomas Stamford Raffles dalam bukunya *The History of Java* :

"... keluarga petani hampir seluruhnya tak tergantung dari tenaga buruh, kecuali tenaga kerja anggauta keluarganya

¹³ *Ibid.*, hlm. 144-145.

¹⁴ S.H. Alatas, *Mitos PribumiMalas: Citra Orang Jawa, Melayu dan Filipina dalam Kapitalisme Kolonial* (Jakarta: LP3ES, 1988) , hlm. 116.

sendiri... sebab hampir setiap benda yang diperlukan suatu keluarga dihasilkan dalam lingkungannya sendiri. Di setiap gubug terdapat jantera dan alat tenun".¹⁵

Di dalam perekonomian desa yang statis, tidak ada ekonomi pasar atau masyarakat yang mengenal uang. Itulah sebabnya mengapa pajak tanah dalam bentuk uang mengalami kegagalan. Ekonomi uang belum membudaya di kalangan penduduk desa, bahkan sampai paroh pertama abad ke-20 inipun masih banyak penduduk pedesaan yang terbiasa hidup ber-swasembada. Pengaruh ekonomi barat hampir tidak sampai kepada orang-orang desa, karena adanya jarak yang luar biasa antara lalu-lintas dunia dengan petani yang sederhana. Paling banyak hanya sampai ke desa saja, yakni melalui persetujuan-persetujuan. Akan tetapi di dalam desa sendiri, terpaksa dipergunakan ikatan desa.¹⁶

Semakin luasnya tanah yang dimiliki oleh petani, maka semakin luas pula areal tanaman tebu untuk industri gula. Sebab gula merupakan salah satu komoditi ekspor Hindia Belanda, sehingga tebu merupakan tanaman prioritas yang harus ditanam petani. Industri gula biasanya berdasarkan produksi tebu atau umbi gula oleh petani yang berdiri sendiri, yang merupakan bahan baku gula yang dibeli oleh pabrik gula. Jadi terdapat pemisahan antara pabrik gula di satu pihak, dan usaha pertanian rakyat yang berdiri sendiri di lain pihak. Akan tetapi, di Jawa dalam abad yang lalu, sistem pembelian itu, selain beberapa pengecualian yang

¹⁵ Svein Aass, 'Relevansi Teori Makro Chayanov untuk Kasus Pulau Jawa', dalam Soediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (eds), *op. cit.*, hlm. 128-129.

¹⁶ D.H. Burger, *Sedjarah ... op.cit.* hlm. 157.

boleh diabaikan, sudah diganti dengan bentuk organisasi baru, yaitu pabrik gula juga mengadakan sendiri pertaniannya dengan menanam tebu sendiri di atas tanah sewaan dengan tenaga upahan. Dengan demikian, penanaman tebu rakyat sudah kehilangan kemerdekaannya.¹⁷

Tebu sebenarnya merupakan tanaman yang dapat tumbuh di lahan kering, tetapi peluang hidup yang lebih besar dan yang dapat memiliki nilai produksi yang tinggi, adalah bila ditanam di lahan basah (Sawah). Sebetulnya, lahan kering untuk budidaya tebu sudah lama dilakukan di Indonesia (Hindia Belanda) yang sudah diperkenalkan sejak abad ke-15 oleh pendatang dari Cina, dalam bentuk perladangan tebu.¹⁸ Akan tetapi, perkebunan tebu milik pengusaha-pengusaha pabrik gula umumnya bahkan hampir secara keseluruhan, menanam tebu di lahan basah. Karena perlakuan tebu yang demikian ini, ada yang menyebutkan bahwa tanaman tebu di Jawa terlalu dimanjakan. Pernyataan yang demikian ini, sebenarnya kurang tepat, atau bahkan salah sama sekali.

Seorang pengusaha, sudah barang tentu akan selalu berusaha untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, dan menghindari resiko sekecil-kecilnya. Pemilik perkebunan tebu dengan pabrik gulanya, tidak akan mau mengambil resiko dengan menanam tebu di lahan kering. Sebab di lahan basahlah tebu memiliki peluang hidup yang lebih baik, bila dibandingkan dengan lahan kering. Selain itu, penanaman tebu di lahan basah juga memberikan ke-

¹⁷ D.H. Burger, *Perubahan ... op.cit.* hlm. 162.

¹⁸ 'Pertanian Pangan dan Ekspor: Isu Sang Primadona Pak Tani', dalam : Kompas, 2 Januari 1989.

untungan lain, yakni murahnya biaya transportasi dan tenaga kerja yang banyak. Hal ini disebabkan karena daerah persawahan umumnya berada di dataran rendah, memiliki sarana dan prasarana transportasi yang baik, dan juga jumlah penduduk atau tenaga kerja yang jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan di daerah pegunungan.

Mengenai tenaga kerja upah di pedalaman, dapat ditunjukkan kira-kira tiga hal pasti. Dalam tahun 1920 kerja upah hampir tidak terdapat pengaruh dari kepala-kepala desa, tetapi di lain pihak telah terdapat banyak perpindahan rakyat bebas ke perkebunan-perkebunan kopi dan tebu. Karena kurangnya rodi pada waktu itu, maka pemerintah pun dapat memperoleh lebih banyak pekerja-pekerja. Jadi proses terlepasnya kerja bebas dari ikatan adat, telah berlangsung sejak pertengahan abad ke-19 atau permulaan abad ke-20.¹⁹ akan tetapi tak boleh dilupakan, bahwa politik kolonial Belanda juga cenderung untuk membiarkan petani Jawa sebagian untuk tetap berpegang pada proses produksi tradisional yang bersifat komunal.

Ada bukti-bukti lain, bahwa selama abad ke-19 res-pons orang Jawa sangat besar terhadap kesempatan-kesempatan kerja baru berdasar upah uang. Mereka ikut terlibat penuh dalam ekonomi perdagangan dunia, namun pada saat yang sama orang Jawa bersikap hati-hati terhadap pemasukan teknik-teknik produksi baru. Ekonomi desa hanya sebagian yang berintegrasi dengan bentuk-bentuk baru kapitalisme perdagangan barat dan perusahaan perkebunan besar. Integrasi yang telah terjadi demikian itu, yaitu integrasi

¹⁹ D.H. Burger, *Sedjarah ... op.cit.* hlm. 228.

dari tanah dan tenaga kerja pribumi, secara paksa telah dijalankan dan bukannya tumbuh dari masyarakat pedesaan Jawa. Pemerintah Belanda pada umumnya mencoba menghargai adat lama, dan mengakui otoritas-otoritas kepala adat ini, dan tidak langsung berhubungan dengan para petani. Perkembangan unsur-unsur perjanjian yang bersifat lebih pribadi dalam tingkah laku ekonomi cenderung diperlambat.²⁰

Pada masa pemerintahan Van der Capellen, bahwa orang-orang Eropa hanya sedikit sekali memanfaatkan penguasaan tanah pertanian, sebab penyerahan tanah kepada orang-orang Eropa, berarti penyerahan daerah dan penduduknya. Jadi merupakan tanah swasta. Orang-orang Eropa yang berada di Indonesia biasanya menganggap demikian mengenai penyerahan tanah, seperti ternyata dari permohonan-permohonan penyerahan seluruh Kabupaten Kudus. Pada waktu itu orang-orang Eropa menghendaki supaya dapat mempergunakan tanah dan tenaga kerja dalam suatu hubungan produksi yang organis dan tertentu. Dalam penyerahan tanah serupa itu, maka sebagian dari produksinya akan jatuh ke tangan tuan-tuan tanah. Bila ini terjadi, akan merugikan penduduk atau pemerintah, sedangkan produksi pertanian tidak bertambah dan keuntungan lainnya tidak ada. Karena itu menurut Van der Capellen, turut campurnya orang Eropa dalam pertanian, kecuali bagi gula dan nila yang penting itu, hanya akan menjadi penghambat kemajuan penduduknya.²¹

²⁰ Justus M. van der Kroef, 'Penguasaan Tanah dan Struktur di Pedesaan Jawa', dalam: Soediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (eds), *op.cit.*, hlm. 153-154.

²¹ D.H. Burger, *Sedjarah ... op.cit.* hlm. 148.

Mundurnya pasaran gula internasional yang terjadi sejak awal dasawarsa abad ke-19, ternyata baru membaik pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Du Bus de Gisignies. Sistem uang muka menyebabkan pengusaha memperoleh sebagian produksi, dihidupkan kembali. Di samping itu, pemerintah melakukan sejumlah tindakan lain untuk menunjang industri gula. Akibat adanya pembaruan dan produksi gula, maka produksinya dapat melonjak dari 2.150 metrik ton pada tahun 1827, menjadi 7.600 metrik ton pada tahun 1832.²²

Bagi Du Bus, memajukan kemakmuran rakyat adalah tujuan utamanya. Bertambahnya ekspor rakyat, akan menguntungkan perdagangan Belanda. Menurut Du Bus, pembukaan pertanian Eropa akan mempunyai manfaat yang lebih banyak lagi. Ia berkeyakinan, bahwa perusahaan-perusahaan baru itu akan menarik tenaga kerja, sehingga desa-desa akan terbebas dari bahaya kelebihan penduduk. Oleh sebab itu, diusahakan agar pemilikan tanah bagi tiap penduduk semakin bertambah, dengan demikian kemakmuran rakyat akan bertambah pula. Dengan semakin meluasnya pemilikan tanah ini, di desa-desa tidak akan timbul kesenjangan antara pemilik tanah luas dan petani pemilik tanah kecil. Bila langkah-langkah pemilikan tanah tidak diadakan, terjadi lebih banyak perbedaan antara si kaya dan si miskin.²³

Berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, ternyata tidak membawa hasil yang memuaskan.

²² Pieter Cruetzberg dan J.T.M. van Lannen (eds) , *op. cit.*, hlm. 272.

²³ *Ibid.* , hlm. 169.

kan. Stelsel tanah (*landelijk stelsel*) yang diterapkan sejak zaman Raffles, setelah berlangsung 20 tahun (1810-1830), mengalami kegagalan. Azas-azas penghapusan kefeodalan, pemberian kebebasan dan kepastian hukum serta perlindungan hukum, ternyata tidak mampu mendatangkan kemakmuran rakyat. Impor modal dari negeri Belanda yang dimaksud Du Bus, pada waktu itu adalah suatu yang tak mungkin dilaksanakan. Tujuan stelsel tanah tersebut, setelah satu abad kemudian masih belum dapat diwujudkan.²⁴

Kesukaran-kesukaran yang dialami Van der Capellen, ternyata juga dialami oleh Du Bus. Ia juga dihadapkan kepada suatu pilihan yang sulit, antara membiarkan pengaruh para kepala dan mempergunakan organisasi desa untuk menolong perusahaan-perusahaan, ataukah tetap berpegang kepada penghapusan kefeodalan dan membiarkan perusahaan-perusahaan itu menghadapi kegagalan. Dalam tahun-tahun sulit, saat keuangan pemerintah Belanda mengalami kesukaran,²⁵ ia digantikan oleh Gubernur jenderal Van den Bosch.

Van den Bosch seperti halnya Du Bus, tidak percaya bahwa perkembangan ekonomi di Jawa akan timbul dengan spontan dari rakyat, karena itu dia menghendaki lebih banyak campur tangan orang-orang Eropa dalam produksi ekspor. Kalau Du Bus menghendaki pemasukan modal swasta guna meningkatkan ekonomi rakyat, maka van den Bosch mengusahakan agar kepemimpinan di berbagai sektor kehidupan, khususnya ekonomi, dipegang oleh orang-orang Eropa dan pengusaha-pengusaha. Kalau stelsel tanah mengadakan pemisahan antara pemerintah dan kehidupan pe-

²⁴ *Ibid.*, hlm. 167.

²⁵ *Ibid.*

rusahaan, tetapi Van den Bosch justru mempersatukan kembali.²⁶

Selain itu, dalam usahanya memperbaiki keuangan pemerintah Belanda, ia kemudian menerapkan sistem penanaman baru, yaitu Sistem Tanam Paksa.

2.2 Industri Gula di Kabupaten Kendal

Sebelum pengukuhan Sistem Tanam Paksa oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1830, pengolahan air tebu menjadi gula untuk pasaran dunia di pulau Jawa hanya dilakukan dalam skala kecil. Pembuatan gula hanya dilakukan di perkebunan-perkebunan milik Cina dan Belanda di Jawa Barat. Diantaranya banyak bertebaran di sekitar kota Batavia, wilayah Pasuruan, di ujung paling timur pulau Jawa. Pulau yang lebih dari 10 tahun sebelum datangnya Van den Bosch, beberapa pengusaha pabrik telah membangun industri kecil, namun agaknya cukup kuat berdasarkan penggilingan tebu rakyat.²⁷

Dalam pemerintahan gubernur Jenderal Johannes Van den Bosch dalam tahun 1830, di Jawa mulai dijalankan Sistem Tanam Paksa, yang dalam beberapa hal adalah sebagai reaksi terhadap stelsel tanah yang diadakan sebelumnya. Pengalaman yang didapat dari stelsel tanah memberikan pelajaran, bahwa kekuasaan feodal masih sangat berpengaruh dan masih harus dihormati. Orang-orang Eropa tidak akan dapat memperoleh apa-apa jika mereka tidak mempergunakan or-

²⁶ *Ibid.*, hlm. 174.

²⁷ G.R. Knight, 'Kaum Tani dan Budidaya Tebu di Pulau Jawa Abad ke-19: Studi dari Karesidenan Pekalongan 1830-1870, dalam: Anne Both dkk. (eds), *Sedjarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 74-75.

ganisasi desa, dan bahwa untuk produksi ekspor diperlukan pimpinan orang Eropa.²⁸

Van den Bosch menganggap penanaman wajib tebu sebagai suatu perusahaan rakyat. Penanaman kopi hanya memerlukan teknik yang sederhana dan tidak membutuhkan pimpinan orang Eropa, dan karena itu tetap di tangan penduduknya sepenuhnya. Van den Bosch menganggap penanaman tebu demikian juga. Itulah sebabnya para kepala diberi tugas pimpinan oleh Van Den Bosch, dan dia mengherdaki supaya fungsi pegawai-pegawai pemerintah Eropa sedapat mungkin terbatas pada pengawasannya saja.²⁹

Disamping aneka tugas yang langsung berkaitan dengan budidaya tanam paksa, Sistem Tanam Paksa juga menuntut agar kaum tani melakukan rodi yang lazim mereka lakukan untuk pembesar bumiputera, atau untuk keperluan masyarakat desa. Kerja rodi ini antara lain, untuk perbaikan sarana yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan Sistem Tanam Paksa itu, demi kelancaran Sistem, diperlukan jalan dan jembatan untuk pengangkutan hasil budidaya, penyempurnaan fasilitas pelabuhan, pembangunan gedung kantor dan kediaman para pejabat, serta untuk pabrik dan gudang, dan juga perluasan areal budidaya dengan pembangunan bendungan dan menggali saluran-saluran irigasi. Semakin pentingnya pulau Jawa untuk pihak Belanda, diperlukan pengerahan sejumlah besar kaum tani untuk membangun kubu-kubu pertahanan, antara lain benteng yang dibangun di berbagai tempat dan

²⁸ D.H. Burger, *Sedjarah ... op.cit.* hlm. 174.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 197.

kota besar pada pertengahan abad yang lalu.³⁰ Di Karesidenan Semarang juga terdapat beberapa benteng untuk pertahanan, seperti di Kota Semarang, Ungaran dan lain-lain.

Nila dan tebu ditanam bergiliran di sekitar sawah-sawah yang tersedia, dan karena itu sebelum penanaman dimulai, para petani harus membongkar pematang dan saluran yang lazimnya diperlukan untuk penanaman padi. Petani juga harus menyiapkan lahan perkebunan yang luas untuk ditanami tebu atau nila, lalu setelah itu, lahan dikembalikan lagi untuk ditanami padi. Agar dapat ditanami padi, sawah itu harus disingkirkan lebih dahulu dari akar-akar tanaman tebu yang ditanam sebelumnya, kemudian dibentuk lagi petak-petak sawahnya. Khusus dengan budidaya tebu, adakalanya sawah disusun dalam kompleks yang luas-luas, yang harus digarap oleh beberapa desa bersama-sama. Untuk maksud ini, para petani harus menempuh jarak yang cukup jauh dari desanya menuju kebun tebu. Kesulitan ini masih ditambah dengan kesulitan lain, yakni beberapa desa yang sawahnya ditanami tebu harus terpaksa menggunakan lahan lain yang jauh letaknya untuk ditanami padi. Namun lambat laun, di setiap desa terdapat kebun tebunya sendiri, tetapi dalam hal ini, timbul kesulitan bila dalam suatu desa tidak atau sedikit sekali terdapat lahan yang sesuai untuk budidaya tebu atau nila. Dalam keadaan demikian, kaum tani terpaksa pergi ke desa-desa yang secara intensif melaksanakan budidaya ekspor untuk memenuhi kewajiban budidaya itu, dan mereka harus menyerah-

³⁰ R.E. Elson, 'Kemiskinan dan kemakmuran Kaum Petani pada Masa Sistem Tanam Paksa di Pulau Jawa' dalam Anne Booth, dkk. (eds), *op. cit.*, hlm. 50.

kan sebagian dari sawahnya sendiri kepada penduduk desa bersangkutan. Sebagai imbalan untuk pelaksanaan budidaya itu sampai panen, penggarap tebu diberi upah sesuai dengan jumlah gula yang dihasilkan dari tebu yang telah ditanam. Mereka menerima upah tambahan untuk pekerjaan penebasan tebu, mengangkutnya, dan mengerjakannya di pabrik gula, yang semuanya merupakan kerja wajib pula.³¹

Karesidenan Semarang seperti juga karesidenan lain di wilayah kekuasaan Hindia Belanda, juga terkena ketentuan melaksanakan Sistem Tanam Paksa. Semarang memiliki keadaan geografis, masyarakat, dan latar belakang kultural yang berlainan bila dibandingkan dengan daerah lain, menyebabkan pengaruh Sistem Tanam Paksa juga berlainan pula. Perbedaan utama, adalah mengenai tingkatan dan ruang lingkup pelaksanaan Sistem Tanam Paksa itu sendiri.³²

Menurut Djoko Suryo, penduduk di Karesidenan Semarang yang terlibat dalam pelaksanaan penanaman tanaman pemerintah selama periode 1837-1845, relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan di karesidenan lain. Seperti juga di daerah lain, tanaman kopi merupakan tanaman utama penduduk. Kecilnya jumlah penduduk yang terlibat dalam Tanam Paksa ini, sesuai pula dengan kecilnya luas tanah yang dipergunakan dalam Sistem tersebut.³³ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel III berikut.

³¹ *Ibid.*, hlm.44.

³² Lihat djoko suryo, Thesis ... *op. cit.* , hlm. 22.

³³ *Ibid.*

Tabel III: Persentase Keterlibatan Penduduk dan Persentase Luas Tanah untuk Sistem Tanam Paksa di Jawa Periode 1837-1845.

Karesidenan	Persentase Jumlah Penduduk Yang Terlibat dalam:						Persentase Luas Tanah Untuk		
	Seluruh Tanaman Pemerintah			Seluruh Tanaman Pemerintah Kecuali Kopi			Tanaman Paksa Kecuali Kopi		
	1837	1840	1845	1837	1840	1845	1837	1840	1845
Bantam	76	92	48	2	20	25	2	4	7
Priangan	86	65	67	2	9	9	3	2	2
Krawang	25	42	37	25	42	3	-	-	-
Cirebon	73	69	54	55	49	7	11	11	8
Tegal	51	44	36	35	28	36	7	6	10
Pekalongan	57	59	55	37	46	23	13	15	12
Semarang	35	30	25	5	5	40	6	1	2
Jepara	37	35	35	16	24	10	3	5	6
Rembang	35	31	25	5	14	25	0.5	1	2
Surabaya	29	32	33	28	31	21	3	3	4
Pasuruan	77	59	64	54	31	31	13	11	12
Besuki	40	47	54	12	19	33	4	6	7
Pacitan	60	72	63	22	-	24	-	-	-
Kedu	86	79	97	6	1	-	5	2	1
Bagelan	35	81	62	23	54	6	6	15	11
Banyumas	77	68	74	35	33	43	12	12	9
Kediri	59	61	61	24	23	36	7	6	4
Madiun	60	59	51	26	23	19	4	5	4
Seluruh Jawa	54	57	53	20	25	25	4	6	6

Sumber : Djoko Suryo, *Social and Economic Life in Rural Semarang Under Colonial Rule in the later 19th Century* (Thesis submitted for the Degree of Doctor of

Pada tahun-tahun permulaan Sistem Tanam Paksa, pada prinsipnya perusahaan-perusahaan gula adalah pemborong pembuatan gula pemerintah, seperti pada waktu sebelumnya. Mereka sama sekali tidak campur tangan dalam soal penanaman tebu, mencari bahan bakar dan lainnya, pemobngan tebu, pengangkutan dari kebun-kebun tebu ke pabrik-pabrik dan juga soal tenaga yang dipekerjakan di pabrik. Semuanya itu menjadi urusan para pejabat pemerintah dari tingkat atas sampai tingkat terbawah, yaitu dari bupati sampai kepala desa. Akan tetapi, sistem ini dalam perkembangannya ternyata tidak sesuai dengan kondisi-kondisi yang dituntut oleh perusahaan-perusahaan gula. Terutama setelah perusahaan-perusahaan itu tumbuh menjadi pabrik-pabrik yang mempergunakan alat penggilingan dan kilang dengan mesin uap, yang harus bekerja secara besar-besaran. Sistem produksi tradisional desa dan birokrasi dalam pemerintahan terlampaui lambat untuk melayani kebutuhan pabrik yang serba cepat dan tepat waktu.³⁴

Baru pada masa Sistem Tanam Paksa, tebu ditanam untuk pemerintah di Kabupaten Kendal-Karesidenan Semarang. Pada tahun 1832, perkebunan tebu pertama ditanam di Distrik Perbuan, sebagai percobaan. Beberapa tahun kemudian, perkebunan diperluas ke Distrik Truka, Kendal, dan Kaliwungu, yang semuanya terletak di Kabupaten Kendal.³⁵

³⁴ Suharjo Hatmosuprobo., *op. cit.*, hlm. 74-75.

³⁵ Djoko Suryo, Thesis ... *op. cit.*, hlm. 74-75

Pada mulanya, salah satu keberatan terbesar yang menyangkut perkebunan tebu, yang seringkali dirasakan oleh penduduk desa adalah, bahwa penduduk diwajibkan menyerahkan tanah-tanahnya atau sebagian dari tanahnya untuk dijadikan perkebunan tebu tersebut, sehingga tidak dapat dihasilkan padi untuk satu tahun. Jangka waktu sebuah desa untuk menyerahkan seluruh atau sebagian tanahnya untuk perkebunan tebu, akan lebih menguntungkan atau lebih baik jika jangka waktu itu semakin pendek, agar penduduk tidak menanggung rugi.³⁶

Adanya perkebunan tebu di daerah Kendal, pertentangan selalu dapat disingkirkan, sehingga dari pihak penduduk dan petani tidak terdengar keberatan-keberatan. Keberatan hanya timbul secara tetap dengan adanya pertukaran tanah, antara desa yang satu dengan desa yang lain. Sekalipun demikian, seperti yang diketahui, hal ini kemudian dapat diselesaikan dengan baik. Antara penduduk dengan pengusaha pabrik atau administraturinya, dengan sukarela mengadakan perjanjian untuk penanaman tebu. Tidak tercapainya penanaman tebu pada tahun 1858 membuktikan bahwa untuk sementara harus ada campur tangan dari pihak pemerintah, dan jika dianggap memungkinkan, campur tangan ini dihapuskan.³⁷

Tanah-tanah untuk *onderneming* Puguh dan Kaliwungu termasuk tepat, sedangkan Gemuh tanahnya liat dan sukar diolah. Akan tetapi dengan pengerjaan yang baik, tanah tersebut dapat menjadi lahan pertanian yang baik. Adapun daerah Cepiring tergolong tanah yang kurang tepat, dan sukar pengolahannya.

³⁶ *Nota Inspektur Perkebunan di Afdeeling 2.*

³⁷ *Kultuur Archief 1858.*

Tentang keadaan tanah ini, bila dibandingkan dengan lahan perkebunan tebu di Karesidenan Pekalongan, pada umumnya lebih baik.³⁸

Penanaman tebu dilakukan dengan pembibitan. Bibit yang diperlukan, sebelumnya dimasukkan ke dalam lubang-lubang berlumpur dan diberi kesempatan untuk bersemi. Dengan demikian, dapat dipilih bibit-bibit yang sehat yang nantinya dapat dengan mudah ditanam pada lahan yang sudah disediakan. Jika penanaman telah selesai, maka selokan-selokan diperdalam dan dikurangi penyiramannya. Setelah dirabuk, maka penduduk membuat pagar. Selama proses ini, para kepala desa tidak perlu ikut campur. Setiap desa menurut jumlah penanamnya, membuat pagar dengan bambu belahan. Hal ini dilakukan, agar tidak diserang oleh babi hutan. Penggemburan tanah dan peninggian tanah yang mengitari selokan-selokan, dilakukan secara teratur yang ditentukan oleh kepala-kepala bangsa pribumi. Untuk mengerjakan semua ini, penduduk sudah sangat berpengalaman.³⁹

Menurut kepentingan kerja paksa yang diperlukan, dapat dilakukan oleh beberapa keluarga saja. Beberapa pekerjaan tidak perlu dimasukkan dalam peraturan, dan dengan demikian kesejahteraan rakyat akan lebih baik. Dalam daftar yang dimasukkan dalam laporan, dicatat pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan oleh penduduk yang terpanggil untuk setiap pekerjaan, juga jumlah dalam bagian maupun ketentuan dalam pekerjaan paksa tersebut.⁴⁰ Adanya pembagian tugas, ternyata dapat mempermudah penga-

³⁸ *Nota Inspektur Perkebunan di Afdeeling 2.*

³⁹ *Kultuur Archief 1858.*

⁴⁰ *Kultuur Archief 1861.*

wasan yang dilakukan oleh para kepala desa terhadap pekerjaan yang dilakukan secara perseorangan, dan dapat membuat para kepala desa dapat bertindak tegas terhadap orang yang malas bekerja. Cara ini sekaligus juga mencegah terhadap tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara semata-mata, atau tindakan meringankan atau pembebanan beberapa orang dari kewajiban yang harus dikerjakan di kebun tebu. Bila tidak dilakukan pengawasan, hal demikian dapat dengan sudah terjadi. Menurut pendapat Inspektur Perkebunan *Afdeling 2*, dengan diberlakukannya cara bekerja secara bersama atas dasar yang diuraikan diatas, dapat dipandang menguntungkan dan diperlukan oleh kedua belah pihak. Lebih-lebih lagi, mereka yang telah berpengalaman tentang keberatan-keberatan penduduk yang mengalami penekanan dari kepala desa.⁴¹

Nampaknya hampir semua kepala desa merupakan alat yang efektif dalam memperlancar Sistem Tanam Paksa, khususnya dalam industri gula. Mereka bukan saja menjadi pengawas dan pengerah tenaga kerja, tetapi sekaligus juga menjadi *calo-calo* penyewaan tanah yang setiap saat siap memainkan perannya untuk mencari keuntungan pribadi di atas keuntungan rakyat. Dalam pelaksanaan Tanam Paksa di daerah Kendal, di luar dan kecuali upah tanaman, kepada para kepala desa (*lurah*) masih menerima *premi* yang diperhitungkan menurut taksiran yang disesuaikan dengan banyaknya *bau* yang ditanami. Premi yang diterima para *lurah* untuk setiap *bau*-nya, untuk Puguh dan Gemuh antara 6 sampai 20 pikul.⁴²

⁴¹ *Nota Inspektur Perkebunan di Afdeeling 2.*

⁴² *Kultuur Archief 1858.*

Sistem Tanam Paksa yang sesungguhnya membebaskan petani dari pajak tanah, dan sebagai gantinya harus menanam tanaman ekspor milik pemerintah pada 1/5 luas tanahnya. Atau sebagai alternatif, bekerja selama 66 hari setiap tahunnya di perkebunan-perkebunan milik pemerintah atau di proyek lain.⁴³ Pada perkebunan gula, keluarga-keluarga petani yang memiliki bagian sawah atau tanah yang menjadi pemilikan bersama, diikutsertakan sebagai tenaga kerja. Kerja paksa adalah tugas bagi keluarga-keluarga yang dapat bekerja tetapi tidak memiliki tanah, sedangkan yang bebas dari kerja paksa ialah mereka yang termasuk dalam laporan kerja paksa menurut kelas. Peraturan kerja paksa tahun 1844/1845 dan pembaharuannya tahun 1859/1860, dilaksanakan menurut *art.* 5, sehingga kewajiban-kewajiban bagi tiap orang sesuai dengan tata-cara dan keperluan yang ada. Peraturannya dan pembagiannya dapat berjalan dengan baik, dan selalu dijaga agar tidak terjadi pelanggaran.⁴⁴

Jika penduduk tidak dibebani pembuatan jembatan-jembatan atau saluran-saluran, masih juga dikenal kewajiban pemeliharaan dan pengolahan kembali tanah bekas kebun tebu, untuk dijadikan persawahan menurut cara yang biasa berlaku. Bila keadaan memungkinkan, dibuatkan perkebunan-perkebunan khusus tebu yang luas. Setelah padi dipanen, maka oleh setiap desa, luas tanah yang sudah ditentukan, dibajak dan dicangkul dengan baik. Pematang-pematang dibuat, saluran-saluran digali, pembibitan tebu diatur menurut jarak yang sudah ditentukan.⁴⁵

⁴³ Clifford Geertz, *op. cit.*, hlm. 54.

⁴⁴ *Kultuur Archief 1861.*

⁴⁵ *Kultuur Archief 1858.*

Kendal memiliki sawah seluas 3702 *bau*, sehingga untuk perkebunan seluas 400 *bau* dalam jangka waktu sewa 9 tahun, dan untuk 500 *bau* untuk jangka waktu sewa selama 7 tahun, ada kemungkinan untuk memperoleh hasil yang sama. Dengan cara ini, tanah-tanah tersebut setelah diolah ada kesempatan untuk penguapan. Sedapat mungkin diusahakan untuk setiap pabrik, sehingga memperkecil adanya kebun-kebun. Setiap 3 atau 4 tahun sekali, dan jarang dilakukan untuk 5 tahun sekali, tanah digunakan untuk penanaman tebu. Penanaman dilakukan tidak terlalu jauh dari pabrik, karena menurut pengalaman, tindakan yang demikian itu seringkali kurang tepat. Dahulu setiap 2 atau 3 tahun sekali tanahnya ditukar, tetapi kemudian tidak lagi, sebuah lahan yang digunakan untuk penanaman tebu sudah tepat.⁴⁶

Tanah yang luas tidak selamanya menguntungkan, bila tidak diimbangi sarana dan prasarana yang memadai. Pabrik dengan luas lahan lebih dari 400 *bau* dalam perbandingannya, akan berkurang hasilnya jika dibandingkan dengan *onderneming-onderneming* dengan luas lahan yang lebih kecil. Karena adanya kesukaran-kesukaran teknis maupun nonteknis yang dihadapi pabrik gula, maka penanaman tebu dari pabrik-pabrik gula di Kendal pada tahun 1860 diturunkan luasnya menjadi 1800 *bau*. Pada tahun-tahun berikutnya, penanaman ditambah sehingga pabrik-pabrik Cepiring, Puguh dan Gemuh sempat menga-

⁴⁶ Pada tahun 1858, jarak terjauh dari kebun tebu ke kediaman pengusaha-pengusaha adalah 5 *pal*, sampai ke pabrik-pabrik hanya 3 *pal*. Jadi, kuli yang bekerja pada pabrik gula harus berjalan sejauh 5 *pal*. Di luar dan kecuali menurut peraturan, penanaman yang ditentukan seluas 400 *bau* untuk setiap pabrik Puguh dan Gemuh. Lihat: *Kultuur Archief 1858*.

lami pasang surut.⁴⁷ Penanaman tebu di tanah areal yang luas, memerlukan pabrik dan sarana pengangkutan yang memiliki kapasitas yang tinggi dan juga memerlukan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak. Keterlambatan yang terjadi sejak tebu dipotong sampai diolah dalam pabrik, dapat menurunkan kualitas maupun kuantitas gula yang dihasilkan.

Tanah-tanah yang dipergunakan untuk penanaman tebu, disesuaikan dengan luas tanah persawahan dari desa-desa yang jauh diberi ganti rugi yang seimbang. Sebagian besar tukar tempat demikian, juga memperhatikan jarak antara desa-desa tersebut, terutama jarak desa dengan pabrik. Selain itu, diperhatikan pula berbagai cara agar para kepala desa mengatur petani yang mengerjakan, mengolah, menanam dan memelihara tanaman dengan luas yang sama. Cara pemagaran pun, setiap orang harus dengan panjang pagar sama pula.⁴⁸

Upah harian untuk setiap penanaman untuk 50 hari kerja kerja penuh pada perusahaan gula, adalah ber-beda antara pabrik yang satu dengan yang lain. Jumlah uang yang dibayarkan berubah setiap tahunnya, adakalanya bertambah besar adakalanya justru bertambah kecil. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel IV berikut:

⁴⁷ *Nota Inspektur Perkebunan di Afdeeling 2.*

⁴⁸ *Kultuur Archief 1858*

Tabel IV : Upah Harian untuk 500 Hari Kerja Penuh di Perusahaan Gula di *Afdeeling* Kendal 1857-1859 (F)

Pabrik	1857		1858		1859	
	+	-	+	-	+	-
Puguh	36 ^{1/4}	16	45 ^{1/2}	31 ^{1/2}	26	9 ^{1/2}
Gemuh	40	28	44 ^{1/2}	21	48 ^{1/2}	26
Cepiring	43 ^{1/2}	19 ^{1/2}	58 ^{1/2}	26	40 ^{1/2}	25

Sumber : *Kultuur Afdeeling 2*.

Keterangan : + : penherimaan terbanyak

- : penerimaan terkecil

Keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari perusahaan gula dan pertanian, bisa dikatakan sama besar. Untuk satu *bau* tanaman tebu, dapat menghasilkan pendapatan bersih sekitar f.100. Jika diperhatikan keuntungan-keuntungan yang lain dari penanaman padi, setelah dikurang biaya pengolahan tanah, pembelian bibit, pengeluaran untuk biaya pemotongan sampai pada penyimpanan dalam lumbung, bila padi itu termasuk yang b̄emutu umum, maka dapat mencapai hasil bersih f.60. Untuk hasil dari palawija yang juga memerlukan biaya, pengeluaran dapat dianggap sama. Jika dijumlahkan, akan memperoleh keuntungan lebih banyak. Akan tetapi harus diperhitungkan juga hari-hari kerja yang diperuntukkan bagi pertanian tersebut. Di sini dapat dibuktikan, bahwa keuntungan pemerintah dan penanaman bebas tidak jauh berbeda. Penghasilan yang tinggi ini diperoleh dari kedua-duanya dan para penduduk mengenyam keuntungannya. Penanaman tebu secara sukarela yang pada saat itu (1859 dan 1860) dinyatakan oleh kedua belah

pihak, penyewa dan penduduk, sangat merugikan. Alasannya, tidak diperhitungkan sama sekali.⁴⁹

Dalam perjanjian tahun 1860, pihak pemerintah ikut campur dalam hal penanaman, agar para pe-ngontrak juga masih harus membayar pajak tanah yang rata-rata f.10, f.6, f.4,50. Selain itu, para pengontrak masih harus membayar kepada penduduk menurut taksiran, masing-masing untuk setiap *bau* rata-rata adalah f. 140 untuk setiap 30 pikul, f.120 untuk 20 pikul, f.90 untuk 10 pikul. Setelah dikurangi pajak tanah, penduduk masih menerima dari pemerintah untuk setiap *baunya* rata-rata f.95 untuk setiap 30 pikul, f.64 untuk 20 pikul, dan f.32 untuk 10 pikul. Dengan demikian, para penduduk f.53 lebih banyak untuk penanaman sukarela dibandingkan dengan penanaman wajib dari pemerintah. Keberhasilan panen tahun 1860, memberikan harapan baik bagi pengontrak. Dengan demikian, dapat diharapkan pada tahun-tahun berikutnya agar penduduk dengan sukarela mau menanam tebu dapat tercapai.⁵⁰

Mengenai pajak tanah, kenaikannya harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Jika tidak, kenaikan pajak akan dapat mengakibatkan meningkatkan jumlah kriminalitas, seperti yang pernah terjadi. Cara menetapkan tanah-tanah milik yang tidak ditanami, juga dilakukan pencatatan beberapa kali. Kenaikan maupun penurunan pajak tanah yang tergantung pada

⁴⁹ *Kultuur Archief 1861*. Pada tahun 1858 penduduk telah mengadakan perjanjian dengan pengusaha pabrik gula Puguh dan Gemuh, untuk penanaman tebu secara sukarela, pada sebidang tanah yang telah ditentukan. Pada tahun 1860, penduduk mengadakan suatu perjanjian lagi dengan administrator Cepiring dan Puguh, tetapi dalam perjanjian kali ini ditentukan bahwa penduduk harus pula merawat tanaman dengan baik.

⁵⁰ *Kultuur Archief 1858*.

hasil panen, seringkali terjadi di Kabupaten Kendal. Untuk kenaikan pajak tanah pada tahun 1861 tidak ada yang menentang, sekalipun kesempatan itu ada. Pada saat menghadapi akhir tahun, penduduk membayarnya kepada pemerintah (lurah). Dengan melalui *lurah*, pajak segera dapat ditarik dan negara tidak akan rugi dalam pemungutannya yang dilakukan secara teratur tersebut.⁵¹

Dalam usahanya memenuhi kebutuhan lahan perkebunan tebu, para pengusaha pabrik gula menggunakan tanah penduduk yang diperoleh melalui sewa. Sewa tanah untuk jenis kelas I seharga f.140, kelas II f. 120, dan kelas III f.90 per *bau*, sedangkan pajak tanahnya harus dibayar oleh pengusaha pabrik. Selain itu, pengusaha pabrik harus dapat mencukupi sendiri kebutuhan-kebutuhannya, antara lain: kayu bakar, keranjang dan material lain tanpa meminta bantuan pemerintah.⁵²

Khusus mengenai sewa tanah, tanpa adanya campur tangan dari pemerintah, para penyewa tanah tidak akan memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Dengan diberlakukannya peraturan-peraturan kontrak baru, maka segera terjadi banyak kemajuan.⁵³ Sekalipun panen tahun 1859 berbeda dengan panen tahun 1858, tetapi dapat dikatakan tidak begitu merugikan, jika ditinjau dari penanaman dengan perpanjangan kontrak dalam tahun 1858 untuk tahun panen 1859. Untuk setiap pabrik ditetapkan penanaman meliputi luas 400 *bau*, sedangkan pada tahun sebelumnya untuk Puguh dan Gemuh 500 *bau*, Cepiring 600 *bau*.

⁵¹ *Kultuur Archief 1861.*

⁵² *Kultuur Archief 1858.*

⁵³ *Kultuur Archief 1861.*

Menurut laporan tahun 1858, hasil produksi dari Puguh adalah 2.135,94, Cepiring 1.534,97 dan gemuh 1.893,70 pikul. Turunnya produksi dari tiap perkebunan, adalah disebabkan oleh tanah yang kurang baik yang dipakai perkebunan tebu, akibat dipergunakannya sistem pertukaran tanah.⁵⁴

Untuk penanaman tebu, diperlukan banyak tenaga kerja. Banyaknya penanam untuk setiap *bau*, dapat dilihat dari Tabel berikut:

Tabel V : Banyaknya Penanam untuk Setiap *Bau* 1857-1859

Pabrik	1857		1858		1859	
	-	+	-	+	-	+
Puguh	3	4	4	10	4	12
Gemuh	4	5	4	9	4	9
Cepiring	4	8	1	10	4	7

Sumber : *Kultuur Archief 1858*

Keterangan : - : paling sedikit

+ : paling banyak

Dari Tabel V diatas, dapat diketahui bahwa industri gula di Kabupaten Kendal cukup banyak menyerap tenaga kerja. Kalau setiap perkebunan rata-rata mempekerjakan 4 orang saja untuk setiap *baunya*, maka pada tahun 1857 sudah dapat menyerap sekitar 1600 orang tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja ini belum termasuk yang bekerja di pabrik-pabrik penggilingan, usaha jasa angkutan dan lain-lain jasa yang terkait dengan industri gula. Adapun biaya penanaman

⁵⁴ *Kultuur Archief 1858.*

untuk setiap *baunya*, adalah sebagai terlihat dari Tabel VI.

Tabel VI A.

Pabrik	1857		
	I	II	III
Puguh	22,40	61,20	41,20
Gemuh	70,20	52,65	35,10
Cepiring	33,13	62,35	41,86

Sumber : *Kultuur Archief 1858*.

Tabel VI B.

Pabrik	1858		
	I	II	III
Puguh	126,56	97,12	68,28
Gemuh	92	69	46
Cepiring	113,40	85,05	56,70

Sumber : *Kultuur Archief 1858*.

Table VI C.

Pabrik	1861		
	I	II	III
Puguh	47,98	52,45	33,75
Gemuh	113,60	85,20	?
Cepiring	91,10	68,32	41,55

Sumber : *Kultuur Archief 1858*.

Perkebunan tebu tidak menghalangi pertanian padi, jagung dan bahan makanan lainnya. Menurut laporan tahun 1859 yang dapat diketahui, menunjukkan bahwa pertanian padi dapat berhasil dengan baik, dan dapat memberikan bahan pangan sampai pada tahun 1860 kepada penduduk. Dalam laporan tentang pertanian padi, kendal memilikii tanah, Kendal memiliki tanah seluas 18.695 *bau*. Tahun 1861 dipergunakan untuk perkebunan tebu seluas 1300 *bau*, dan pada tahun 1862 seluas 1.600 *bau*. Panen padi pada tahun 1861 dari sisanya yang sebanyak 17.385 *bau*, sudah terhitung potongan upah *penderep*, menghasilkan padi sebanyak 296.350 pikul untuk 104.977 jiwa. Pada tahun 1860, panen padi menurun, tetapi penanaman *palawija* berhasil. Untuk mencukupi kebutuhan beras, maka terpaksa memasukkan padi sebanyak 25.000 pikul. Pada tahun 1861 panen pad lebih baik, dan tanaman *palawija* juga berhasil sehingga hanya mendaftarkan padi sebanyak 7.000 pikul.⁵⁵

Sekalipun di Kendal sawah banyak yang digunakan untuk areal tanaman tebu, tetapi ternyata tidak mengurangi kesejahteraan kehidupan petani. Hal ini terbukti, pada waktu lain di wilayah Karesidenan Semarang, seperti Grobogan dan Demak mengalami kekurangan beras dan terjadi bencana kelaparan (1848/1849), di Kendal justru tidak mengalaminya. Padahal, banyak areal persawaham yang dipergunakan untuk budidaya tanaman tebu. Akibat bencana kelaparan yang terjadi di Grobogan dan Demak itu, jumlah penduduk kedua daerah itu semakin berkurang. Demak berkurang dari 336.000 pada tahun 1848, menjadi 12.000 jiwa pada tahun 1850. Grobogan jumlahnya

⁵⁵ *Kultuur Archief 1858 dan Kultuur Archief 1861.*

mengalami kekurangan yang sangat besar, dari 95.000 menjadi 9.000 jiwa.⁵⁶

Kabupaten Kendal masih bisa bertahan menghadapi berbagai kesulitan pangan, sebab penggunaan sawah untuk perkebunan tebu tidak menyita seluruh areal pertanian pangan. Puguh yang memiliki tanah persawahan seluas 3.782 *bau*, yang dipergunakan untuk tanaman tebu hanya seluas 500 *bau*. Cepiring, dari 3.830 *bau* tanah sawah, digunakan untuk penanaman tebu hanya seluas 600 *bau*. Untuk Kaliwungu, tidak dimasukkan, karena tidak ada catatan.⁵⁷ Kenaikan harga pangan yang terjadi waktu itu (1858), masih tercukupi oleh jumlah penerimaan para petani. Harga beras 5 atau 6 sen per *kati*. Dengan demikian, upah buruh di pabrik dinaikkan, di siang hari menjadi 20 sen, dan di malam hari 24 sen.⁵⁸ Selain itu, semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Kendal pada setiap tahunnya, memberikan indikasi bahwa di daerah ini cukup menjanjikan kehidupan yang lebih baik, bila dibandingkan dengan di kabupaten lain. Terbukti, tiga tahun terakhir saja penduduk Kabupaten Kendal telah bertambah sebanyak 7.543 jiwa.⁵⁹

Penghasilan penduduk yang bekerja di perkebunan tebu tidak selamanya mengalami kenaikan. Bahkan, pada tahun-tahun tertentu mengalami penurunan. Menurunnya penghasilan penduduk disebabkan oleh berbagai hal, seperti banyaknya jumlah tenaga kerja yang lebih besar bila dibandingkan dengan luas tanah

⁵⁶ *Encyclopedie van Nederlandsche-Indie* (ENI) (Jilid I, Cetakan II, 's Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1917), hlm. 581. Lihat pula : *Sejarah Daerah Jawa Tengah* (Depdikbu, 1978), hlm. 112-113.

⁵⁷ *Nota Inspektur Perkebunan di Afdeeling 2*.

⁵⁸ *Kultuur Archief 1858*.

⁵⁹ *Nota Inspektur Perkebunan di Afdeeling 2*.

yang harus dikerjakan. Atau, menrunnya harga gula di pasaran dunia. Untuk jelasnya, dapat dilihat dalam Tabel VII berikut:

Tabel VII : Penghasilan Keluarga dari Para Penanaman Tahun 1857-1859 dalam Gulden.

Pabrik	1857		1858		1859	
	+	-	+	-	+	-
Puguh	14,28	6,72	31,46	13,09	?	?
Gemuh	16,41	9,22	19,64	19,64	20,22	?
Cepiring	18,12	8,21	8,21	23,20	10,50	?

Sumber : *Kultuur Archief 1858*

Keterangan : + : paling banyak

- : paling sedikit

Gula tidak mengalami peningkatan secara mendadak, seperti halnya kopi pada masa Sistem Tanam Paksa. Hal ini terutama disebabkan karena kemajuan produksi gula sangat tergantung pada perbaikan teknik, baik pada waktu penanaman maupun pada waktu penggilingan, dan ini memerlukan waktu serta modal untuk mengembangkannya. Selain itu, luas lahan yang ditanami tebu untuk seluruh Jawa hanya bertambah kira-kira 18%, antara tahun 1853 sampai dengan tahun 1861, produksi gulanya meningkat sampai tiga kali lipat.⁶⁰

Di *Afdeeling* Kendal dapat diperoleh penanaman dan panen yang memuaskan, setelah adanya musim kemarau yang panjang. Pada tahun 1863 dan tahun 1865, dapat dibuat stek-stek yang membuktikan bahwa

⁶⁰ Cliifloed Geertz, *op. cit.*, hlm. 71.

keadaan kering menguntungkan tanaman tebu. Dengan demikian, penyiraman-penyiraman tanaman hanya nampak baik pada permulaan tetapi kemudian akan rusak dengan adanya hujan. Di karesidenan-karesidenan di Jawa bagian Timur, dapat diperoleh hasil tebu yang sangat memuaskan, sebab justru dengan adanya larangan penyiraman. Di *Afdeeling* Kendal justru sebaliknya, sehingga hasilnya kurang baik. Penyiraman yang terus menerus tidak diperlukan, karena tanah disini pada umumnya terdiri tanah liat (*lempung*) yang banyak mengandung air. Adapun waktu giling, di Jawa Tengah pada umumnya dilakukan pada musim hujan, sedangkan di Jawa Timur tidak. Hampir semua penanaman dari pabrik-pabrik yang ditanam tahun 1866, sebagian besar telah dipotong pada paruh kedua tahun 1865, dan selebihnya tidak diambil. Dengan demikian, untuk pengolahan dari penanaman dengan tanah sempurna, memungkinkan produksi gula untuk Karesidenan Semarang dapat meningkat, meskipun kesuburan tanah tidak perlu dipermasalahkan lagi. Penanaman pada masing-masing desa mewujudkan kebun sendiri, sedangkan penanaman yang dilakukan secara bersama berupa kebun-kebun besar yang dilakukan secara besar-besaran pula. Penanaman untuk pabrik gula Puguh seluas 500 *bau*, dan terdiri atas tiga bagian kebun Dari Kaliwungu dan Gemuh, masing-masing seluas 500 *bau*, juga terdiri atas tiga bagian kebun. Akibat cara penanaman yang demikian, menimbulkan kesukaran bagi para penduduk yang harus bekerja jauh.⁶¹

Industri gula di Jawa, sejak tahun 1831 sampai dengan tahun 1865, secara umum dapat dikatakan

⁶¹ *Nota Inspektur Perkebunan di Afdeeling 2.*

terus meningkat, baik jumlah pabrik, luas areal tanam, produksi, maupun jumlah ekspornya. Untuk jelasnya, dapat dilihat pada Tabel VIII. Mengenai produksi gula di Kabupaten Kendal untuk 10 tahun (1855-1864), tidak menunjukkan kenaikan yang mencolok. Kecuali pada produksi tahun 1863 dan selanjutnya, seolah-olah tetap. Produksi tahun 1855 ada 40.753 pikul, atau 19 pikul per *bau*. Tahun 1856 ada 71.365 pikul, atau 34 pikul per *bau*. Tahun 1857 ada 52.299 pikul, atau 25 pikul per *bau*. Tahun 1858 ada 52.387 pikul, atau 36,5 pikul per *bau*. Tahun 1859 ada 52.387 pikul, atau 31 pikul per *bau*. Produksi gula tahun 1861 ada 55.249 pikul gula atau 30,5 pikul per *bau*. Tahun 1862 ada 60.218 pikul, atau 28,5 pikul per *bau*. Tahun 1863 ada 101.649 pikul, atau 48 pikul per *bau*; sedangkan tahun 1864 sebanyak 62.069 pikul, atau 29,5 pikul per *bau*.⁶²

Tabel VIII: Jumlah Pabrik Gula, Luas Areal Tanaman Tebu, Produksi Gula, dan Jumlah Ekspor Gula Tahun 1831-1865.

Tahun	Jumlah Pabrik Gula	Luas Areal (hektar)	Produksi (metrik ton)	Ekspor (metrik ton)
1831	8	16.555	6.700	7.430
1835	40	12.357	20.600	26.430
1840	63	22.701	38.000	61.750
1845	75	27.346	78.000	88.642
1850	99	29.204	102.000	84.648
1855	99	28.816	102.000	102.044
1860	96	27.976	130.000	128.865
1865	95	33.299	142.000	135.734

⁶² *Nota Inspektur Perkebunan di Afdeeling 2.*

Sumber : Loekman Soetrisno, 'Sektor Informal : Wajah Baru Perekonomian Indonesia pada Masa Pasca "Boom Minyak", dalam: Mubyarto (ed.), *Prospek Pedesaan 1986* (Yogyakarta: P3PKUGM, 1986), hlm. 62.

Dari Tabel VIII diatas, dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah pabrik bertambah cepat, terutama sejak tahun 1835 sampai dengan tahun 1850. sementara itu, penurunan jumlah pabrik tidak sebesar pertumbuhannya. Dari tabel tersebut juga ternyata bahwa jumlah banyaknya pabrik tidak selalu mempengaruhi jumlah produktivitasnya. Hal ini terbukti, bahwa pada tahun 1865 jumlah pabrik ada 95 buah, tetapi produksinya mencapai 142.000 metrik ton. Pada tahun 1850 maupun 1855 jumlah pabrik mencapai 99 buah, tetapi jumlah produksinya hanya mencapai 102.000 metrik ton. Nampaknya luas areal tanaman tebu dan kemampuan giling pabriklah yang sangat menentukan besar kecilnya produksi gula. Meningkatnya jumlah produksi gula di Jawa, disebabkan juga oleh bertambahnya produksi gula di Karesidenan Semarang, dalam hal ini dari Kabupaten Kendal.

Untuk jangka waktu 10 tahun terakhir, hasil yang diperoleh dalam tahun 1863 merupakan hasil yang terbaik, yaitu 48 pikul untuk setiap *baunya*. Di antara keempat pabrik gula yang ada di Kabupaten Kendal, produksi yang tertinggi justru diperoleh dari pabrik gula Kaliwungu. Pada tahun 1863 produksinya pernah mencapai 60 pikul untuk setiap *baunya*. Panen tahun 1865 setiap pabrik memperoleh keuntungan yang lebih baik, bila dibandingkan dengan tahun 1864, atau dapat disamakan dengan hasil panen tahun 1863 yang termasuk paling baik selama 12 tahun terakhir.

Panen tebu meningkat bila dibandingkan dengan panen tahun sebelumnya, diperkirakan kurang-lebih 25 pohon per meter. Meningkatnya panen itu disebabkan musim kemarau yang panjang pada tahun 1864, seperti musim kemarau tahun 1862 sehingga panen tahun 1863 sangat menguntungkan. Panen yang lebih baik ini, membuktikan bahwa pengguraan air di perkebunan tebu merupakan tugas utama para pengawas bangsa Eropa maupun bangsa pribumi. Pengawasan dilakukan pada saat pengolahan, dan pembajakan tanah. Pada beberapa kebun, tebu yang dipotong di areal pabrik Kaliwungu maupun Gemuh, masih terdapat sisa tanaman (*tunggul*) yang dapat mengurangi hasil panen selanjutnya, maupun penghasilan bagi pengusaha pabrik.⁶³

Pengawasan atas perkebunan tebu dari pabrik-pabrik gula Puguh, Gemuh, dan Cepiring yang seluruhnya seluas 1.600 *bau*, dilaksanakan oleh *kontrolir* yang berdiam di Kendal, dengan dibantu oleh 6 orang mantri yang digaji. Perkebunan pabrik gula Kaliwungu seluas 500 *bau*, berada dibawah seorang *kontrolir* yang berdiam di Boja, yang dibantu oleh dua orang mantri. Jarak dari Boja ke Kaliwungu adalah 12 *pal*, yang harus ditempuh dengan naik kuda. Distrik Boja terkenal dengan kebun kopinya, yang pada tahun 1865 menghasilkan kopi yang cukup baik. Beberapa pengusaha menanam kopi di atas tanah gersang, di tempat-tempat pembeli tembakau berdiam. Dengan demikian, pengawasan terhadap tiga buah gudang kopi dan kontrak kayu juga berbagai usaha lain, diserahkan kepada seorang pegawai yang berdiam di tempat itu. Saat petik kopi, waktunya bersamaan dengan saat tanam tebu.

⁶³ *Nota Inspektur Perkebunan di Afdeeling 2.*

Jarak antara dua perkebunan tersebut cukup jauh, sehingga pengawasan atas salah satu perkebunan tidak dapat dilakukan oleh seorang *kontrollir* bangsa Eropa saja. Berhubung dengan hal ini, mengingat kesibukan yang harus dilakukan, pengawasan atas perkebunan tebu milik pabrik Kaliwungu diserahkan kepada seorang *kontrollir* dari Kendal, yang lebih dekat. Hal ini disebabkan karena, jarak dari Kaliwungu sampai Kendal hanya sampai 4 *pal* dan lagi, dekat dengan jalan pos yang menuju ke Semarang, sehingga *kontrollir* yang berada di Kendal lebih mudah melaksanakan pengawasan atas tanaman-tanaman tersebut, dari pada *kontrollir* yang berdiam di Boja yang jauhnya 12 *pal*.⁶⁴

Dari 76 desa yang harus melaksanakan penanaman untuk pabrik Puguh, pada tahun 1865 terdapat 28 desa yang penduduknya bertempat tinggal 2 sampai 4 *pal* dari kebun-kebun yang harus mereka kerjakan. Selain itu, masih ada 5 buah desa lagi yang ternasuk dalam pabrik gula Cepiring, para penduduk dari 39 desa harus berjalan 3^{1/2} sampai 4 *pal*. Dari 21 desa lagi, jauhnya antara 1 sampai 2 *pal*, sebelum mereka dapat memulai pekerjaannya. Setelah itu, mereka harus menempuh jarak yang sama untuk pulang kembali ke rumahnya. Dari 114 desa yang penduduknya harus mengerjakan penanaman di areal pabrik gula Gemuh, terdapat penduduk dari 45 desa yang harus berjalan 2 sampai 3^{1/2} *pal* dari rumahnya untuk sampai di perkebunan. Dari 35 desa lainnya, penduduk harus berjalan lebih dari 1 sampai 2 *pal*. Adanya kebun-kebun yang lebih banyak lagi, yang dimiliki pabrik gula Kaliwungu, mempekerjakan penduduk dari 40 desa. Dari 40 desa ini, hanya 17 desa saja yang harus berjalan

⁶⁴ *Nota Inspektur Perkebunan di Afdeeling 2.*

antara 1 sampai 2 *pal*. Jauhnya tempat kerja ini, merupakan kesulitan yang cukup beralasan.⁶⁵

Gula mengatasi berbagai kendala yang ada di pabrik-pabrik gula di *afdeeling* Kendal, Inspektur perkebunan di *afdeeling* 2 mengusulkan kepada Residen Semarang, yang terjemahnya antara lain:⁶⁶

1. Kepada pegawai-pegawai yang melaksanakan pengawasan :
 - a. Agar pada waktu pemilihan tanah yang setiap tahunnya diadakan, penukaran kebun-kebun untuk tiap pabrik dipikirkan benar-benar agar jangan sampai setiap 2 atau 3 tahun dibuat perkebunan tebu kembali, sekalipun dalam keadaan yang memaksa.
 - b. Demi memudahkan pemeliharaan kebun-kebun yang setiap tahunnya diserahkan untuk penanaman tebu, agar kebun-kebun tersebut berada sedekat mungkin dengan desa-desa penduduk yang bekerja di perkebunan tebu tersebut. Pada pemilik kebun yang lebih banyak, hendaknya diusahakan agar tidak terlalu luas dan yang berdekatan letaknya.
 - c. Agar digunakan dan ditempuh cara penanaman yang benar.
 - d. Secepatnya diadakan perubahan-perubahan yang terdapat dalam persoalan-persoalan untuk melengkapi keputusan 26 Mei 1857 No. 8, yang salinannya berhubungan dengan pabrik Kaliwungu diberikan kepada *kontrolir* Boja.
2. Agar dipertimbangkan rencana-rencana :

⁶⁵ *Nota Inspektur Perkebunan di Afdeeling 2.*

⁶⁶ *Nota Inspektur Perkebunan di Afdeeling 2.*

- a. Penanaman tebu yang sedang dilaksanakan (1865) dikerjakan secara perorangan seperti yang dikerjakan dalam pertanian atau persawahan.
 - b. Pengawasan atas penanaman untuk perkebunan Kaliwungu ditugaskan kepada *kontrollir* dari Kendal bukan lagi konrolir dari Boja.
3. Kepada para penanam tebu di daerah ini, diperingatkan akan kerugian yang akan diderita dalam produksinya karena menanami seluruh kebunnya dengan jenis *tebu hitam*, yang seharusnya sebagian lagi ditanami dengan jenis *tebu Jepara*. Seperti di Pekalongan, penanaman tahun sekarang (1865) tebunya beragi dan mengering.
 4. Kepada pengusaha-pengusaha pabrik gula Kaliwungu dan Gemuh, dianjurkan untuk membersihkan tunggul-tunggul (*bongkot*) dari potongan-potongan tebu yang telah dipanen, karena merugikan panen.

Semarang, 10 Agustus 1865
Inspektur Perk. di Afd. 2
Ttd

Van Spell

Mengenai tenaga kerja di pabrik-pabrik gula di *afdeeling* Kendal, seperti umumnya yang terjadi di pabrik gula di Jawa. Hampir semua pabrik gula masih mendapatkan pekerja-pekerja dengan perantaraan pemerintah. Karena itu, pada tahun 1864 untuk seluruh pabrik gula di Jawa dikeluarkan perintah untuk me-

megang teguh peraturan-peraturan, dan perintah itu diulangi lagi pada tahun 1866. Dalam tahun 1867, untuk pemotongan tebu dan pekerjaan-pekerjaan di pabrik masih dilakukan hampir satu setengah juta kerja hari. Menurut Millard, dalam tahun 1869 kerja bebas itu masih jarang sekali, dan walaupun ada, hanyalah dalam pekerjaan-pekerjaan di pabrik-pabrik saja.⁶⁷

Pemotongan tebu di pabrik gula Kaliwungu dilakukan dengan tenaga sukarela, sedangkan pabrik lain mendapat tenaga pemotong tebu dengan perantaraan pemerintah. Para pekerja mendapat upah 1 sen untuk setiap ikat (*bongkok*), yang terdiri dari 25 batang. Pabrik Kaliwungu memberi upah kepada para pekerja sukarela tersebut $\frac{1}{2}$ sen untuk batang-batang tebu yang masih berdiri, dan 1 sen untuk tebu yang sudah ditebang. Menurut keterangan, usaha yang serupa dilakukan pula oleh pabrik-pabrik lain untuk memperoleh tenaga pemotong sukarela seperti di Kaliwungu, sampai tahun 1865 belum dapat dicapai, sehingga setiap tahunnya pihak penguasa terpaksa ikut campurtangan untuk menukupi kebutuhan tenaga pemotong tebu, seperti yang dibutuhkan.⁶⁸

Campur tangan pemerintah melalui kepala-kepala desa inilah yang menurut Elson, faktor kunci bagi suksesnya Sistem Tanam Paksa. Begitu pula van Niel telah menarik kesimpulan yang sama: "Perang-sang untuk menggalakkan hasil budidaya pemerintah adalah pemenuhan keinginan dari pemerintah penguasa di tingkat desa". Sementara itu, Fasseur telah menekankan arti penting tidak saja kaum *priyayi*, melainkan juga para kepala desa atau *lurah*, sehingga men-

⁶⁷ D.H. Burger, *Sedjarah ... op. cit.*, hlm. 219.

⁶⁸ *Nota Inspektur Perkebunan di Afdeeling 2.*

jadi "sumbu tempat Sistem Tanam Paksa berputar", menarik kesimpulan bahwa "Sistem tersebut tidak mungkin berjalan tanpa kerja sama golongan elite desa yang terkemuka". Kualifikasi penting dari tesisnya ini, yang dibahas oleh beberapa penulis masa kini, sebaliknya menyatakan bahwa juga terdapat konflik maupun persesuaian antara tuntutan-tuntutan industri gula sesudah tahun 1870, dan kepentingan-kepentingan kaum *priyayi* maupun kepala-kepala suku.⁶⁹

⁶⁹ G.R Knight, 'Kaum Tani dan Budidaya Tebu di Pulau Jawa Abad Ke-19: Studi dari Karesidenan Pekalongan 1830-1870', dalam Anne Booth, dkk. (eds.), *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 76-77.

BAB III

PENGARUH INDUSTRI GULA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT

4.1 Kehidupan Sosial-Ekonomi

Menurut Knight, perwujudan industri gula merupakan satu-satunya hasil karya mengagumkan dari Sistem Tanam Paksa, khususnya dalam hal penerapan teknologi “modern” kepada perluasan produksi untuk pasaran dunia. Menurut pendapatnya, hal ini dimungkinkan sebagian besar oleh modal yang disediakan Van den Bosch dan para penggantinya di pucuk pemerintahan kolonial Belanda dalam bentuk pinjaman kepada para “kontraktor” mereka, yaitu para pengusaha pabrik. Para pengusaha menyanggupi untuk menggiling tebu dan menghasilkan gula untuk pemerintah sebagai ganti penyediaan bahan-bahan keperluan dan persentase hasil produksi mereka, yang sebagian besar, setidaknya secara tetap, disetor kepada pemerintah sesuai dengan kontrak mereka. Akan tetapi,

menurut pendapatnya, kunci ekspansi gemilang industri ini bagaimanapun juga terdapat tebu bermutu tinggi yang semakin lama semakin terjamin persediaannya, dan bukan karena modernisasi pabrik itu sendiri.¹

Pendapat Knight ini tidak sepenuhnya benar, sebab dengan tebu yang bermutu tinggi tanpa ditunjang oleh kemampuan produksi yang tinggi dari suatu pabrik, justru akan menurunkan kualitas maupun kuantitas produksi gulanya. Tebu yang sudah dipotong dan tidak segera diolah di pabrik, sekalipun dari tebu yang bermutu tinggi, akan mengurangi mutu maupun jumlahnya. Agar tebu dapat segera digiling di pabrik, tentunya diperlukan kemampuan produksi yang tinggi dari suatu pabrik. Kemampuan yang tinggi ini tidak lain ialah modernnya pabrik itu sendiri.

Tumbuhnya industri gula di Kabupaten Kendal lah mengakibatkan tumbuhnya ekonomi uang di pedesaan, khususnya mereka yang terlibat secara langsung dalam mata rantai industri tersebut. Menurut Soedjito, uang merupakan kunci dari pada pemasaran. Dengan uang orang dapat bertindak rasional, dengan menyisihkan emosi-emosi yang ada. Di dalam daerah yang peredaran uangnya sangat terbatas, maka sebagai suplemen daripada uang digunakan tenaga sebagai alat tukar. Barter atau alat pertukaran tenaga ini membawa serta saling keuntungan. Jika orang tidak menyumbangkan tenaganya, tidak pula akan mendapat pula sumbangan tenaga jika ia memerlukannya. Dalam keadaan saling tergantung ini, terpaksa orang satu

¹ G.R Knight, 'Kaum Tani dan Budidaya Tebu di Pulau Jawa Abad Ke-19: Studi dari Karesidenan Pekalongan 1830-1870', dalam Anne Booth, dkk. (eds.), *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 75.

berhadapan muka dengan orang lain, timbul keharusan untuk membantu. Dalam hubungan langsung antar manusia ini timbul emosi, yang tak mungkin timbul jika digunakan uang. Dalam keadaan yang demikian ini, hubungan manusia diadakan dengan lewat uang. Dengan demikian tidak diperhatikan orang yang melakukan hubungan itu, tetapi yang diperhitungkan adalah uangnya.² Akibat lebih jauh dari semakin membudayanya uang dalam kehidupan masyarakat, adalah tumbuhnya sikap individualis masyarakat. Individualisme seperti yang sekarang disinyalir tumbuh di kota-kota besar di Indonesia, sebenarnya disebabkan dari tumbuhnya ekonomi uang. Ekonomi uang ini, dimulai atau setidaknya disebarluaskan sejalan tumbuhnya industri gula di Jawa, melalui sistem sewa tanah dan tenaga kerja dengan upah (uang). Seperti yang dikatakan Aass, individualitas mengakibatkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara warga desa, yang merupakan suatu pemutusan hubungan dengan pola lama walaupun kelihatannya serupa.³

Sistem Tanam Paksa itu sendiri, menurut pendapat Geertz, mempunyai arti yang sangat menentukan, sekurang-kurangnya tiga hal. Dengan memusatkan hampir seluruh usaha di Jawa, sistem itu telah memberikan bentuk terakhir pada perbedaan yang ekstrem antara Jawa dengan luar Jawa dan semenjak itu perbedaan semakin besar. Sistem itu memantapkan dan menonjolkan pola ekonomi rangkap dengan sektor

² Soedjito Sosrodihardjo, *Perubahan Struktur Masyarakat di Jawa: Suatu Analisa* (Jogjakarta: Penerbit Karya, 1968), hlm. 7.

³ Svein Aass, 'Relevansi Teori Makro Chayanov untuk Kasus Pulau Jawa', Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (eds.), *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa* (Jakarta: P.T Gramedia, 1984), hlm. 127.

Barat yang padat modal dan ekonomi Timur yang padat karya. Sistem itu menyebabkan semakin pesatnya perkembangan sektor Barat dan mempercepat membekunya sektor Timur, dan jurang ini semakin melebar dan mendalam dengan bertambahnya penanam modal Belanda. Lebih penting lagi, sistem ini telah mencegah pengaruh akibat makin mendalamnya penetrasi Barat ke dalam kehidupan petani dan *priyayi* Jawa, sehingga modernisasi pertanian di kalangan pribumi pada saat yang sangat menguntungkan tidak terjadi bagi proses itu.⁴

Menurut Chambers, teknologi padat modal menghancurkan kehidupan buruh dan pekerja, sedangkan komersialisasi mematikan para perajin. Keduanya bersifat memusatkan kekayaan di tangan orang kaya, dan menjadikan mereka semakin kaya. Proses ini juga melemahkan tradisi gotong royong, baik secara vertikal antara majikan dan buruh maupun secara horizontal antara para petani kecil dengan petani penderep. Hubungan sosial berdasarkan kesukarelaan dan wajib menolong hilang, dan diganti dengan hubungan sosial yang berdasarkan upah.⁵ Jadi semakin jelas, bahwa ekonomi uang merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya individualisasi masyarakat. Namun demikian, ekonomi uang juga mempunyai dampak positif bagi kemajuan masyarakat. Sebab, dengan dipergunakannya uang sebagai alat tukar, dapat mengakibatkan tumbuhnya ekonomi perdagangan yang semakin maju. Majunya pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui perdagangan ini telah menimbulkan tumbuhnya

⁴ Clifford Geertz, *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi Indonesia* (Jakarta: Bhratara, 1983), hlm. 55.

⁵ Robert Chambers, *Pembangunan Desa, Mulai dari Belakang* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 48-49.

kelas sosial baru dalam masyarakat, yakni "Orang Kaya Baru".

Orang yang mengalami mobilitas sosial vertikal, lebih-lebih jika disertai mobilitas horizontal, yaitu perpindahan daerah akan meragukan nilai-nilai yang lama. Nilai-nilai lama yang berwujud norma-norma tradisional dikesampingkan, tetapi norma-norma baru belum sempat terbentuk. Lebih-lebih lagi, karena norma-norma ini merupakan tali pengikat atau disiplin yang mengikat masyarakat yang peredaran uangnya sangat berkurang, maka dengan bertambahnya uang saling ketergantungan menjadi berkurang pula. Di dalam keadaan yang demikian ini, kelas pemasaran lama (yang dalam bahasa sehari-hari dinamakan *vested interest*), akan memasuki gelanggang lagi. Kelas pemasaran lama merasa dirinya terdesak oleh timbulnya kelas pemasaran yang baru ini, maka keadaan kacau ini digunakan sebagai saluran bertindak untuk memasukkan kekuasaannya. Bentuk dapat berwujud konflik politik, dan sebagainya.⁶

Ekonomi uang ini telah dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kendal. Sebagai contoh, di pasar hewan Bodri, dekat kota Kendal, banyak diperdagangkan kerbau dan lembu, kambing dan domba yang banyak membawa kesibukan dan meningkatkan perputaran uang, terutama yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari tempat lain.⁷ Dalam hal perputaran uang dapat dikatakan, bahwa semakin meningkatnya perputaran uang mengakibatkan semakin meningkatnya transaksi yang dilakukan. Dalam hal ini Soedjito mengatakan, jika suatu ketika terjadi per-

⁶ Soedjito Sosrodihardjo, *op. cit.*, hlm. 8.

⁷ *Kultuur Archief 1861*.

ubahan harga dari pada hasil produksi masyarakat yang kurang peredaran uangnya, maka timbullah kelas-kelas pemasaran baru di dalam masyarakat semacam itu. Lebih-lebih jika produksi itu merupakan kebutuhan pokok dan menentukan harga daripada kebutuhan-kebutuhan lain di pasaran. Maka terjadi lagi mobilitas vertikal, terjadi perubahan status. Mereka yang semula masuk dalam kelas konsumen, sekarang memasuki kelas pemasaran.⁸

Menurut Ongokham, Sistem Tanam Paksa yang dilaksanakan di Jawa (1830-1870) menimbulkan perubahan yang radikal dalam struktur sosial-ekonomi masyarakat pedesaan di Jawa, yang hanya mungkin dilakukan secara brutal menghancurkan lebih dulu kaum ningrat Jawa, Ongokham membantah Geertz yang mengesankan bahwa penjajahan Belanda melalui cara-cara dan praktek perdagangannya memerintah "Indonesia" tanpa mengubah secara fundamental struktur perekonomian asli.⁹

Ketika Sistem Tanam Paksa diadakan, Van den Bosch mengira bahwa para kepala (desa) akan memegang pimpinan produksi. Oleh karena kebun budidaya memerlukan pengaturan yang lebih banyak dari yang diperkirakan semula, maka pamongpraja Eropa memperoleh tugas yang luas. Lagi pula di tengah-tengah Sistem Tanam Paksa itu terbentuklah suatu kelas pengusaha Eropa. Pengusaha pabrik gula mula-mula hanya berkuasa di dalam batas tembok pabrik-

⁸ Soedjito Sosrodihardjo, *loc. cit.*

⁹ Mubyarto, 'Sejarah Ekonomi Petani Jawa', dalam *Agro-Ekonomika*, No. 21 Tahun XIV, Agustus 1983, hlm. 12. Lihat pula: Hiroyoshi Kano, 'The Economic History of Javanese Rural Society: Reinterpretation'; dalam *The Developing Economies*, Vol. XVIII, No. 1, March 1980, hlm. 20.

nya. Akan tetapi, dengan mendalamnya pengetahuan tentang kebun budidaya tebu, ia mulai ikut bicara, bahkan kemudian menuntut supaya ia menjadi penguasa tunggal di bidang itu. Dengan demikian, para kepala (desa) dilepaskan kedudukannya sebagai pimpinan produksi.¹⁰ Keadaan ini juga terjadi di Kabupaten Kendal. Pada awal tumbuhnya industri gula di kabupaten ini, para kepala desa memegang peranan penting dalam memperlancar industri gula: khususnya dalam hal penyediaan tenaga kerja dan penyewaan tanah. Akan tetapi kemudian, pada saat kedudukan industri gula sudah semakin mantap, maka peran para kepala desa semakin dikurangi, bahkan mungkin dihilangkan sama sekali.

Melemahnya kedudukan para kepala dan semakin menguatnya kedudukan industri gula mengakibatkan interaksi antara perusahaan gula dan desa secara langsung juga semakin luas. Interaksi ini, menurut Soehardjo, boleh dikatakan sebagai interaksi antara dua sistem yang berlainan dan tak seimbang. Perusahaan-perusahaan gula pada masa Sistem Tanam Paksa itu adalah perusahaan-perusahaan yang bertujuan menghasilkan komoditi perdagangan. Selain itu, perusahaan ini dilindungi oleh kekuatan politik yang memegang dominasi dalam masyarakat, yakni pemerintah kolonial. Di pihak lain, desa masih dalam suasana ekonomi tradisional, yaitu *in natura* dengan rumah tangga tertutup, yang dibebani dengan kewajiban-kewajiban feodal tradisional. Dengan demikian, seolah-olah didesak oleh keadaan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan baru, sehingga mau tidak

¹⁰ D.H. Burger, *Perubahan-Perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta : Bhratara, 1977), hlm. 17.

mau desa mengalami perubahan pada struktur sosialnya. Di samping kondisi-kondisi baru yang berasal dari pabrik-pabrik gula, memang ada kondisi-kondisi intern yang memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan struktur itu, seperti bertambahnya jumlah penduduk, perluasan lahan pertanian yang tidak memungkinkan lagi, dan sebagainya.¹¹

Perluasan birokrasi pemerintah atas desa, sehingga menembus isolasi pemerintah desa, khususnya dalam membantu usaha industri gula telah menembus isolasi pemerintah desa. Hal ini mengakibatkan ketergantungan elit desa kepada para petani *klien* mereka menjadi semakin bertambah lemah. Komersialisasi pertanian yang kemudian tumbuh, yakni penetrasi ekonomi uang ke dalam masyarakat pedesaan, mengakibatkan posisi berunding elit desa dalam menghadapi para petani *klien* mereka menjadi semakin kuat. Hal ini mendorong tumbuhnya elit baru, yakni para petani pemilik tanah luas, dan mendorong kelas bawahan, yakni para petani penyewa dan *tuna-kisma* buruh tani.¹²

¹¹ Suhardjo Hatmosuprobo, 'Pabrik-Pabrik Gula di Jawa pada Abad-19: Suatu Studi Praliminer tentang Timbulnya Hubungan Kerja Bebas', dalam P.J. Suwarno, et.al (eds), *Sejarah Indonesia dalam Monografi* (Yogyakarta: Jurusan Sejarah dan Geografi IKIP Senata Dharma, 1980), hlm. 73-74. Mengenai arti interaksi (*interaction*), menurut Yoseph S. Roucek adalah sebagai berikut: "Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal-balik dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung, melalui berita yang didengar atau melalui surat kabar". Lihat : Bintarto, *Interaksi Desa-Kota, dan Permasalahannya* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 62-63.

¹² Moh. Amaluddin, *Kemiskinan dan Polarisasi Sosial: Studi Kasus di Desa Bulugede, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah* (Jakarta: Penerbit Uni-versitas Indonesia, 1987) , hlm. 24.

Menurut Knight, memandang golongan elit desa manapun sebagai "tradisional", berarti kealpaan terhadap hal, bahwa mereka mengalami transformasi radikal berkat perluasan industri,¹³ khususnya industri gula seperti dikemukakan oleh Suhardjo. Suhardjo berkesimpulan, bahwa akibat perusahaan Barat di Jawa, khususnya gula pada abad ke-19 terhadap pada masyarakat desa, adalah besar. Melalui pabrik-pabrik gula itulah sebenarnya sistem uang masuk ke desa, inti dari masyarakat tradisional "Indonesia". Dengan masuknya sistem ekonomi uang itu, masuklah desa sebagai suatu sistem baru yang berlainan dengan sistem tradisional dan juga sistem yang kuat. Akibatnya, ikatan desa tradisional mengalami disintegrasi, institusi-institusi tradisional lenyap secara berangsur-angsur, sebagai gantinya, timbullah institusi-institusi baru.¹⁴

Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa pada mulanya merupakan isu sentral sebagai penyebab terjadinya kemiskinan penduduk Jawa, namun belakangan ini telah muncul suatu argumentasi "aliran modern" yang membantah atau setidaknya tidaknya menyangsikan, bahwa Sistem Tanam Paksa itu merupakan penyebab utama kemelaratan penduduk pulau Jawa. Aliran modern berpendapat, bahwa Sistem itu justru telah meningkatkan kesejahteraan hidup penduduk pulau Jawa. Menurut Elson, di berbagai daerah di Pulau Jawa terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Sistem Tanam Paksa memberikan kesejahteraan hidup petani. Di Karesidenan Pasuruan misalnya, laporan dari residen mengacu pada peningkatan perdagangan lokal, meningkatnya peredaran uang, laba besar diperoleh

¹³ G.R. Knight, *op. cit.*, hlm. 86.

¹⁴ Suhardjo Hatmosuprobo, *op. cit.*, hlm. 81-82.

dari budidaya yang dipaksakan itu, meluasnya kesempatan kerja, penyempurnaan sarana perumahan dan sandang, masuknya pajak secara pesat dan sepenuhnya, dan beraneka tanda mengerai munculnya wira-swastawan pribumi. Rupanya cukup banyak bukti tentang kebenaran keterangan itu, karena bahkan tokoh-tokoh pengecam yang terkuat terhadap sistem ini agaknya mengecualikan Pasuruan dari penilaian yang umumnya bernada suram. W.R. van Hoeffel misalnya, merupakan penentang keras dari pelaksanaan sistem itu, bukan dari azas-azas sistemnya, namun selama perjalanannya di Pasuruan pada tahun 1847, ia menyaksikan tidak lain melainkan kemakmuran dan kesejahteraan, tidak lain melainkan kepuasan dan kebahagiaan. Di daerah Besuki, banyak catatan memuat keterangan yang berulang kali menegaskan bahwa kemakmuran penduduk terus meningkat, dan bahwa sejumlah uang beredar yang belum pernah tersamai sebelumnya sebagai akibat dari pembayaran untuk tenaga kerja tanaman pemerintah. Mengenai Surabaya, van Hoeffel menyinggung soal kemakmuran, kecerahan, dan kegiatan yang berlangsung di daerah yang menggembirakan hati ini. Memang harus diakui, bahwa Besuki dan Surabaya, seperti juga Pasuruan, seringkali dipandang sebagai pengecualian terhadap keadaan yang umumnya terdapat di pulau Jawa, namun juga terdapat banyak keterangan tentang kemakmuran di daerah-daerah lain di pulau Jawa pada berbagai masa selama berlakunya Sistem Tanam Paksa itu. Di Jawa Tengah bagian selatan misalnya, diterima laporan dari Kedu, Bagelan, Kediri dan Madiun, yang menyangkut ada peningkatan kegiatan ekonomi serta kesejahteraan. Di Jawa Tengah utara, Bleeker, seorang ahli demografi

Belanda, menyinggung soal industri dan kemakmuran di Tegal dan Pekalongan. Pada tahun 1857, Pejabat Residen Pekalongan menyinggung soal taraf kesejahteraan yang dialami petani berkat kegiatan industri gula pemerintah, sedangkan pada bagian akhir dasawarsa 1860-an, Residen melaporkan bahwa pajak bumi dapat ditagih dengan cepat dan hampir-hampir tanpa tunggakan, dan bahkan ada penduduk yang membayar pajak sebelum saat jatuh waktunya.¹⁵

4.2 Penguasaan dan Pemilikan Tanah

Dari beberapa jenis tanaman ekspor yang harus ditanam penduduk pada masa Sistem Tanam Paksa, hanya jenis yang dianggap sangat menguntungkan, yakni kopi dan tebu. Kedua jenis tanaman ini mempunyai perbedaan besar dalam hal penggunaan lahan pertaniannya. Kopi ditanam di lereng-lereng gunung, sedangkan tebu ditanam di sawah-sawah dataran rendah. Perbedaan ini menyebabkan pengaruh yang ditimbulkan kedua jenis tanamanpun berbeda pula. Tanaman kopi cenderung memperluas areal tanaman, sedangkan tebu relatif tetap dalam lahan yang sebelumnya sudah dibudidayakan oleh penduduk. Usaha penanaman tebu untuk pasaran dunia dilakukan secara besar-besaran. Bagi masyarakat, pertanian tempat tanaman

¹⁵ R.E. Nelson, 'Kemiskinan dan Kemakmuran Kaum Petani pada Masa Sistem Tanam Paksa di Pulau Jawa', dalam: Anne Booth, et. al. (eds.) , *op.cit.*, hlm. 56-58. Lihat pula: Robert van Niel, 'Warisan Sistem Tanam Paksa bagi Perkembangan Ekonomi Berikutnya', dalam Anne Booth et. al. (eds.) , *Ibid.* , hlm. 99-135 dan G.R. Knight, 'Kaum Tani dan Budidaya Tebu di Pulau Jawa Abad Ke-19: Studi dari Karesidenan Pekalongan 1830-1870', *Ibid.*, hlm. 74-75. Bandingkan dengan Djoko Suryo, 'Sekitar Masalah Kemiskinan di Pedesaan pada Masa Pemerintahan Kolonial', dalam: *Agro-Ekonomika*, No. 23 Tahun XVI, Desember 1985, hlm. 81-95, juga Mubyarto, *Ibid.*, hlm. 7-31.

tersebut dilaksanakan, mempunyai pengaruh yang sangat besar, terlebih lagi jika diperhatikan, bahwa lahan penanaman tebu tersebut adalah persawahan yang terbaik dan subur yang mudah mendapat air, terdapat di dataran yang padat penduduknya.¹⁶ Dengan demikian, penanaman tebu memerlukan lahan sawah penduduk yang sebelumnya ditanam padi, sedangkan kopi tidak. Bahkan, kopi juga tidak memerlukan lahan yang sebelumnya telah dibudidayakan oleh penduduk tetapi membuka lahan baru untuk penanamannya.

Dalam hal penggunaan tanah penduduk ini, Sistem Tanam Paksa dianggap telah memaksa mengubah hak-hak pemilikan tanah desa menjadi milik bersama, dan dengan demikian merusak hak-hak perseorangan atas tanah. Hak-hak pemilikan tanah merupakan kepentingan khusus bagi kelompok-kelompok pengusaha swasta yang ingin mengganti sistem tersebut dengan bentuk eksploitasi mereka sendiri.¹⁷ Selain itu, karena tuntutan akan tanah-tanah pertanian, maka Tanam Paksa sangat berpengaruh atas milik tanah, sehingga hak-hak perseorangan penduduk (petani) sangat dirugikan. Kemungkinan menuntut tanah-tanah menjadi milik bersama (komunal), diperkuat oleh adanya hak menguasai dari desa yang sejak dahulu terdapat di Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan juga bertambah lemahnya hak milik perseorangan petani akibat pengaruh-pengaruh feodal. Hal ini ditambah pula dengan banyaknya tanah yang tidak terurus pada permulaan

¹⁶ W. Huender, *Overzicht van den Economischen der Toestand der Inheemse Bevolking van Java en Madoera* ('s, Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1921), hlm. 81.

¹⁷ Robert van Niel, *op. cit.*, hlm. 117.

abad ke-19, sebagai akibat dari perpindahan untuk menghindarkan diri dari rodi.¹⁸

Menurut Burger, Sistem Tanam Paksa menyebabkan bertambahnya perjanjian-perjanjian antara orang-orang "Indonesia" mengenai penyerahan tanah untuk sementara waktu. Selain itu, stelsel Tanam Paksa mengajari mereka, yang untuk sementara, dengan sukarela atau dengan paksaan, tak mempunyai tanah pertanian harus mempertahankan hidupnya selama mereka tidak mendapat penghasilan dari tanah pertaniannya. Akan tetapi, penduduk di daerah gula ke kemudian menjadi terbiasa dengan kehidupan tanpa tanah semacam itu untuk sementara waktu.¹⁹

Karena pemilik pabrik gula tidak diperkenankan memiliki tanah sendiri, maka mereka menyewa dari penduduk setempat, terutama yang berdekatan dengan lokasi pabrik. Mengenai sewa tanah, menurut Burger, adalah suatu hal yang tidak asing lagi bagi penduduk desa. Sejak dahulu penduduk mengenal persewaan tanah pertanian antara mereka, walaupun persewaan itu biasanya jarang terjadi. Penyewaan tanah komunal tidak diperbolehkan adat, demikian juga penjualannya. Namun keadaan ini tidak berlangsung lama, di bawah stelsel Tanam Paksa timbul perubahan besar dalam pemakaian tanah. Terutama akibat dari penyewaan tanah dengan paksa untuk ditanami tebu dan nila. Selain itu, di daerah-daerah tempat penanaman tebu dipusatkan, terjadi pergeseran pemakaian tanah antara desa sendiri. Pergeseran ini mengenai pertukaran tanah, yang timbul karena paksaan.²⁰ Pergeseran penggunaan

¹⁸ D.H. Burger, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia* (Jilid I, Cetakan III, Jakarta: Pradnjaparamita, 1962), hlm. 191.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 229.

²⁰ *Ibid.*

tanah semacam ini juga terjadi di daerah tebu di Kabupaten Kendal. Karena luas tanah milik perseorangan tidak terlalu luas, hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan pabrik yang bermaksud mengadakan perkebunan secara besar-besaran. Untuk itu, pemilik pabrik gula berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memperoleh sewa tanah yang dapat merupakan satu kesatuan, yang terdiri dari tanah-tanah milik yang tidak luas tadi. Kalau ada tanah milik penduduk yang tidak disewakan, dan tanah tersebut terletak di antara tanah yang telah disewa pabrik, maka tanah penduduk yang demikian ini digeser dan diganti dengan tanah lain, yang letaknya tidak berada dalam kompleks tanah sewa pabrik. Hal ini disamping mempermudah pengawasan dan pemeliharaan, juga mempermudah pemotongan dan pengangkutan ke pabrik-pabrik penggilingan. Sudah barang tentu akibat lebih jauh lagi, adalah penghematan biaya. Dengan penghematan ini, keuntungan pabrik akan semakin besar.

Mengenai sewa tanah, sebenarnya juga sudah membudaya dalam masyarakat pedesaan di Kabupaten Kendal. Menurut Schelteme, di Karesidenan Semarang: Kabupaten Semarang, Salatiga, Kendal, Demak, Grobogan, hanya dari beberapa pedagang pribumi yang menyewa tanah dan menggarapnya dalam bagi hasil.²¹ Menurut van Delden Loeme, bahwa seperti yang biasa terjadi, sejak "dahulu kala" di Jawa ada kebiasaan untuk menggarap sawah milik orang lain dengan imbalan separoh atau sepertiga dari hasil panen.²²

²¹ A.M.P.A. Schelteme, *Bagi Hasil di Hindia Belanda* (Cetakan I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm.144.

²² *Ibid.*, hlm. 138.

Di Kendal perkebunan tebu tidak menghalangi pertanian padi, jagung, dan bahan makanan lainnya. Menurut laporan tahun 1859 diperoleh data yang menunjukkan bahwa pertanian padi dapat berhasil baik dan dapat memberikan persediaan pangan sampai pada panen tahun 1860 kepada penduduk.²³ Dalam hal keberhasilan panen padi di daerah tebu, menurut Geertz, ada dua kemungkinan sebagai penyebabnya: 1) tebu biasanya ditanam di daerah-daerah beras yang terbaik; 2) penanaman padi itu dilakukan secara lebih efisien di daerah gula.²⁴ Selanjutnya Geertz juga menyatakan, daerah gula itu secara proporsi memiliki: 1) lebih banyak sawah; 2) lebih banyak penduduk; 3) meskipun lebih banyak sawahnya yang ditanami tebu, namun produksi berasnya lebih besar daripada produksi beras yang bukan di daerah gula. Adapun sebabnya, hubungan antara tebu, padi, dan kepadatan penduduk adalah jelas: ketiganya tumbuh dengan subur bersama-sama.²⁵ Pendapat Geertz ini memang sesuai dengan keadaan dan kenyataan yang terjadi di daerah tebu di Kabupaten Kendal. Di Kabupaten Kendal yang merupakan daerah tebu untuk Karesidenan Semarang, belum pernah mengendat ataupun mengalami bahaya kelaparan, seperti yang pernah terjadi di Kabupaten Demak dan Grobogan. Sekalipun dibandingkan dua daerah yang memiliki keadaan geografi dan potensi alam yang berbeda tidak sepenuhnya benar, tetapi setidaknya-tidaknya dapat diperoleh suatu kenyataan bahwa perkebunan tebu juga tidak selalu menimbulkan penderitaan rakyat.

²³ *Kultuur Archief 1858.*

²⁴ Clifford Geertz., *op. cit.*, hlm. 79.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 78.

Untuk seluruh Karesidenan di pulau Jawa, perluasan penanaman tebu setempat seperti terlihat dalam Tabel IX berikut ini:

Tabel IX: Perkembangan Luas Tanaman Tebu di Tiap Karesidenan di Jawa Dinyatakan dalam *Bau*

Karesidenan	1833	1860	1910
Banten	2.254	-	-
Cirebon	1.460	4.200	15.000
Pekalongan	777	1.500	3.500
Tegal	560	3.200	10.030
Semarang	543	1.800	3.300
Jepara	5.118	3.700	8.800
Rembang	1.221	-	-
Banyumas	-	300	5.000
Madiun	3.512	800	6.400
Kediri	642	1.900	20.000
Surabaya	4.424	8.000	36.000
Pasuruan	8.361	6.000	13.000
Probolinggo	-	4.700	13.000
Besuki	3.850	2.000	7.000
Banyuwangi	-	-	-
Jumlah:	32.722	38.100	141.300

Sumber : D.H. Burger *Sedjarah Ekonomis-Sosiologis Indonesia* (Jilid II, Cetakan Ketiga, Jakarta: Pradnjaparamita, 1962), hlm. 184-185.

Kabupaten Kendal memiliki sawah seluas 18.695 *bau*, tahun 1861 dipergunakan untuk tanaman tebu seluas 1.300 *bau*, dan pada tahun 1862 seluas 1600 *bau*. Dari luas sawah yang tidak disewakan untuk perkebunan tebu, seluruhnya 17.395 *bau*. Dari luas

sawah yang tidak disewa oleh pabrik gula ini, sesudah dipotong upah *penderep*, masih dapat menghasilkan padi sebanyak 292.350 *pikul*, suatu jumlah yang masih cukup memadai untuk menghidupi jumlah penduduk Kabupaten Kendal yang mencapai 104.977 jiwa.²⁶ Sebab, selain padi, penduduk banyak juga membudidayakan jenis tanaman pangan lain, seperti *palawija*.

Menurut laporan yang diterima oleh Inspektur Perkebunan di *Afdeeling 2*, pada tahun 1860-an, perbandingan penanam dengan pembagian antara keluarga-keluarga adalah satu banding enam. Bagi keluarga petani, pembagian ini dapat mencukupi kebutuhannya dibandingkan pembagian yang terdapat di Karesidenan lain, seperti Besuki, Probolinggo, Madiun, dan Tegal.²⁷

Bukti lain bahwa perkebunan tebu tidak selalu menimbulkan penderitaan rakyat, juga bisa diperoleh dari data tahun sebelumnya. Pada paroh kedua tahun 1850-an, setiap keluarga petani dapat menyimpan bahan makanan untuk satu tahun dari hasil panennya, dari panen padi yang diperkirakan secara merata, yang masih diusahakan ialah penanaman *palawija*, seperti: jagung dan ketela, yang secara besar-besaran diangkut dari Kendal ke Karesidenan Semarang setiap tahunnya. Selain itu, penduduk juga masih dapat menjual hasil tanamannya ke daerah-daerah lain.²⁸

Kabupaten Kendal hanya berjarak sekitar 30 kilometer dari kota Semarang, sehingga banyak penduduk di pedalaman kabupaten yang membawa hasil pertaniannya ke Kota Semarang. Dari Kota Semarang

²⁶ *Nota Inspektur Perkebunan di Afdeeling 2.*

²⁷ *Nota Inspektur Perkebunan di Afdeeling 2.*

²⁸ *Kultuur Archief 1858.*

dibelinya berbagai barang kebutuhan, seperti porselin dan bahan pakaian dan lain-lain.²⁹ Dengan demikian, di Kabupaten Kendal yang merupakan wilayah tebu, komersialisasi hasil pertanian sudah berlangsung cukup lama. Dalam hal komersialisasi pertanian, Temple menjelaskan bahwa, gejala semacam ini telah berlangsung di pedesaan Jawa sejak akhir abad ke-19, dengan ditandai oleh berkembangnya sistem pemilikan tanah secara perseorangan.³⁰ Dengan demikian, komersialisasi pertanian di Kendal, telah berlangsung jauh lebih lama.

4.3. Upah dan Ketenagakerjaan

Di Jawa, industri gula sudah dikenal sejak lama, namun usahanya masih bersifat rumah tangga (*home industry*) yang masih dikelola secara sederhana. Guna memutar penggilingan biasanya digunakan tenaga manusia atau tenaga hewan. Baru setelah Sistem Tanam Paksa diterapkan di pulau Jawa, tumbuhlah perusahaan-perusahaan besar yang mempergunakan mesin-mesin produksi yang lebih maju, yang di gerakkan oleh tenaga air ataupun tenaga uap. Harga pasar yang mantap serta tenaga kerja yang murah, menyebabkan perusahaan-perusahaan ini memperoleh keuntungan yang besar sehingga dapat berkembang dengan pesat.

Tumbuh dan berkembangnya industri besar gula ini, juga telah menyebabkan penduduk pulau Jawa, secara langsung maupun tidak, terlibat dalam mata rantai perdagangan internasional dan sekaligus terlibat

²⁹ *Kultuur Archief 1861*.

³⁰ Moh. Amaluddin, *op. cit.*, hlm. 25.

dalam sistem ekonomi kapitalisme. Dengan industri gula yang dikelola secara besar-besaran ini, telah mampu menjadikan "Indonesia" sebagai salah satu "negara" pengekspor gula terbesar di dunia. Gula menjadi primadona komoditi ekspor non migas "Indonesia", yang ternyata kemudian telah mampu menjadi gabus pulau Jawa, agar tetap mengapung dan tidak tenggelam.

Walaupun sejak abad ke-17 telah mengekspor gula, tetapi secara organisatoris dan jumlah petani yang terlibat dalam proses produksi, peranan ekspor gula sebagai sumber devisa bagi pemerintah penjajahan Belanda pada umumnya dan khususnya pulau Jawa masih sangat marginal. Pada masa Sistem Tanam Paksa, situasi ini berubah. Harga pasaran gula di pasaran internasional yang tinggi dan mantap, mendorong pemerintah kolonial meningkatkan kemampuan pulau Jawa untuk mengekspor gula. Apabila pada abad ke-17 pabrik-pabrik gula masih berupa "*small-scale enterprise*", maka pada masa Sistem Tanam Paksa pemerintah kolonial Belanda mulai mendirikan pabrik-pabrik gula baru yang relatif memiliki teknologi yang lebih maju, daripada pabrik-pabrik gula kecil yang dimiliki oleh orang-orang swasta.³¹

Tumbuhnya industri gula yang berskala besar, telah menimbulkan berbagai perubahan dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Di antara perubahan-perubahan yang terjadi di desa-desa karena berinteraksi dengan pabrik gula itu, menurut Suhardjo, ialah perubahan institusi hubungan kerja tradisional. Menurut pendapatnya, institusi inilah yang pertama kali

³¹ Loekman Soetrisno, 'Sektor Informal: Wajah Baru Per-ekonomian Indonesia pada Masa Pasca "Boom Minyak"', dalam: Mubyarto (ed), *Prospek Pedesaan 1986* (Yogyakarta: P3PK Universitas Gadjah Mada, 1986), hlm. 63.

mengalami perubahan-perubahan, didesak untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan keadaan, yaitu pabrik-pabrik gula yang menghasilkan gula komoditas untuk perdagangan.³²

Bagi penduduk desa, yang dalam pertaniannya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan jiwa masyarakatnya, dalam pabrik-pabrik gula membawa kesulitan-kesulitan khusus, karena pekerjaan ini dilakukan dengan teratur. Kesulitan ini tidak begitu terasa dalam hal penanaman dan pemotongan tebu, karena pekerjaan ini lebih mendekati pertanian yang memang sudah menjadi kebiasaannya. Oleh karena itu, menurut Burger, lama kelamaan penduduk desa membuat peraturan untuk mengatur kerja yang "tidak enak" seperti di pabrik-pabrik. Telah menjadi kebiasaan umum, bahwa beberapa anggota desa diwajibkan melakukan pekerjaan di pabrik dan dibebaskan dari kerja wajib lainnya. Orang yang kaya biasanya menyuruh melakukan kewajiban-kewajiban kerja kepada orang lain yang diberi upah. Peraturan ini banyak membantu penyesuaian rumahtangga desa kepada tekanan Tanam Paksa yang berat itu. Mengadakan peraturan-peraturan seperti ini adalah sesuai sekali dengan sifat desa. Hal serupa itu terdapat pula pada rodi yang juga masih terdapat di desa.³³

Kesulitan-kesulitan tersebut di atas, baik yang dialami oleh pabrik maupun yang dialami oleh penduduk desa, akhirnya menimbulkan penyesuaian baru bagi desa. Hal ini berarti, suatu perombakan terhadap institusi hubungan kerja tradisional. Berhubung dengan itu, sejak tahun 1837, mulai tampak adanya

³² Suhardjo Hatmosuprobo, *op. cit.*, hlm. 74.

³³ D.H. Burger, *Sedjarah ... op. cit.*, hlm. 187.

pekerja-pekerja upahan di kebun-kebun tebu, meskipun pada umumnya mereka itu sebenarnya masih setengah dipaksa. Pekerja upahan yang secara sukarela semakin berkembang, khususnya setelah Sistem Tanam Paksa.³⁴

Sistem Tanam Paksa masih membawa perubahan-perubahan lain yang tidak diinginkan. Di kota-kota pelabuhan dan pabrik-pabrik gula, mulai timbul kerja upahan yang sebelumnya hampir tidak dikenal. Karena kewajiban untuk menyerahkan tanah pertanian guna kepentingan Tanam Paksa, maka sewa menyewa tanah antara penduduk "Indonesia" bertambah banyak. Dengan demikian, telah dipersiapkan masuknya kerja dan tanah ke dalam lalu lintas perekonomian, dan telah diletakkan salah satu dasar perkebunan swasta di masa sekarang.³⁵

Di perkebunan-perkebunan tebu, dapat dikatakan bahwa penanaman tetap bersendikan kerja wajib. Dalam pemotongan tebu, pengangkutan dan di pabrik-pabrik, kerja wajib berangsur-angsur diganti dengan kerja bebas. Demikian pula dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan pemerintah, lambat laun dipergunakan lebih banyak lagi kerja bebas. Dalam tahun 1849, untuk pertama kalinya dipergunakan dalam pembuatan pelabuhan-pelabuhan dan pekerjaan-pekerjaan pertahanan di Surabaya, dan terutama setelah tahun 1860 kerja bebas itu juga banyak dipergunakan. Di bawah Sistem Tanam Paksa, kerja upah bebas itu untuk pertama kalinya dipergunakan secara besar-besaran.³⁶

³⁴ Suhardjo Hatmosuprobo, *op. cit.*, hlm. 76-77.

³⁵ D.H. Burger, *Perubahan ... op. cit.*, hlm. 18.

³⁶ D.H. Burger, *Sedjarah ... op. cit.*, hlm. 191.

Pada mulanya penggunaan air untuk kepentingan-kepentingan perkebunan tebu maupun pabrik gula, menimbulkan berbagai kesukaran bagi rakyat. Kesukaran-kesukaran baru dapat dihilangkan ketika pabrik-pabrik gula mengganti penggilingan yang digerakkan oleh air dengan tenaga uap, yang pemakaiannya dianjurkan oleh pemerintah. Ketel uap yang pertama di pasang di Probolinggo pada tahun 1836, dan hal ini merupakan permulaan berdirinya industri modern di Indonesia.³⁷ Kemudian pada tahun 1853, pabrik sentrifugal pertama yang melakukan pemisahan antara gula dan sirup secara efisien, diimpor ke Jawa. Dari 178 pabrik, 96 buah diantaranya terikat kontrak dengan pemerintah. 96 buah menggunakan ketel silinder tegangan, 57 buah memiliki ketel hampa udara. 57 buah memiliki ketel uap dan mesin, dan 15 buah menggunakan mesin, beroperasi menurut cara tradisional yang sedikit lebih diperbaharui.³⁸

Salah satu keuntungan dari industri gula, menurut Huender ialah, bahwa dengan kemajuan dalam bidang ini telah membuka lapangan kerja kepada penduduk di daerah gula yang semakin padat, yang jika tidak ada industri gula mereka akan sulit memperoleh penghasilan. Pada umumnya, penduduk hanya memiliki tanah yang tidak luas, bahkan banyak yang tidak

³⁷ *Ibid*.

³⁸ Pada tahun 1836, "kawah besi terbuka" untuk pertama kalinya diganti dengan "alat vacuum" yang dirancang untuk mempercepat proses penguapan atau reduksi. Tenaga hewan diganti kincir air, kincir air pun diganti pula dengan mesin uap. Banyaknya jenis alat yang dimiliki memberi gambaran tentang perkembangan industri gula. Sejak tahun 1841, pabrik-pabrik baru menggunakan teknik produksi yang berasal dari industri gula *bit* Eropa. Lihat: Pieter Cruetzberg dan J.T.M. van Laanen (eds), *Sejarah Statistik Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 274.

memiliki tanah sama sekali, sehingga tanpa industri gula mereka akan sulit bertahan. Dengan adanya kesempatan kerja, sekalipun dengan upah yang rendah, mereka sedikit tertolong.³⁹

Untuk mendukung perkembangan ekspor gula, pemerintah kolonial Belanda tidak hanya membangun infrastruktur seperti jalur kereta api baru, tetapi juga menciptakan kebijakan-kebijakan ekonomis yang menguntungkan para pemilik gula. Salah satu kebijakan yang sangat krusial bagi kelangsungan hidup pabrik gula, ialah kebijakan menyangkut pembangunan industri non pabrik gula. Seperti kita ketahui, salah satu faktor ekonomis yang penting bagi keberhasilan industri gula di Jawa, adalah tersedianya tenaga buruh yang murah dan juga sewa tanah yang murah pula. Untuk menunjang ekspor gula, maka mutlak perlu dilestarikannya situasi pulau Jawa sebagai "*labour reserve*" dengan cara tidak membangun industri non gula di Jawa. dengan tidak adanya industri non gula, maka hal ini akan mengikat penduduk desa Jawa di desa-desa mereka masing-masing dan tergantung pada pabrik-pabrik gula sebagai satu-satunya sumber pekerjaan non pertanian bagi para petani Jawa. Hal ini sangat menguntungkan pemilik modal pabrik gula dan juga para pemilik modal lain yang membangun perkebunan non gula di luar Jawa, seperti perkebunan karet di Sumatera Utara. Dengan merekrut kuli-kuli Jawa, para pemilik modal Belanda berhasil membangun perkebunan di daerah tersebut dengan mudah.⁴⁰

Menurut van Geldern, sebenarnya ada keengganan terhadap pekerjaan dalam suasana modern.

³⁹ W. Huender, *op. cit.*, hlm. 88.

⁴⁰ Loekman Soetrisno, *op. cit.*, hlm. 66.

Suasana kerja pribumi yang dimiliki dan sudah terbiasa, membuat pekerja itu puas dengan bayaran yang kecil. Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa orang puas dengan upah kerja yang kecil, supaya dapat bekerja lebih santai. Pendapat ini sebenarnya masih perlu dipertanyakan kebenarannya, sebab pengertian kerja bagi masyarakat Jawa khususnya, Indonesia umumnya, berbeda dengan pengertian "kerja" pada masyarakat Barat. Seperti yang dikatakan Alatas, masyarakat Jawa, Melayu, dan Filipina, pada umumnya pekerja keras, namun pola kerja mereka berbeda dengan pekerja Eropa. Sebagian besar tidak memiliki apa yang kemudian menjadi pola kerja Barat yang tetap, seperti pekerja tambang atau pekerja pabrik. Orang Jawa tidak memiliki jam kerja yang pasti.⁴¹ Dapat dikatakan orang Jawa tidak mengenal hari kerja, sekaligus juga tidak mengenal hari libur. Waktu kerjanya adalah di antara 24 jam sehari, demikian juga liburnya diantara 24 jam sehari. Bekerjanya tidak dapat ditentukan oleh waktu atau jam kerja, demikian juga istirahatnya.

Tenaga yang murah adalah sesuatu yang menandai kehidupan di Jawa, lama sebelum Sistem Tanam Paksa muncul. Para penduduk biasa melakukan pekerjaan-pekerjaan wajib, sebagai tugas-tugas golongan bawah terhadap orang-orang dengan status yang lebih tinggi dan mempunyai kekuasaan yang lebih besar. Hubungan-hubungan ketergantungan disamping perbudakan dalam kebanyakan hal, merupakan kunci yang menentukan dari perbedaan-perbedaan sosial dalam masyarakat. Ketika Belanda menguasai pantai

⁴¹ S.H.Alatas, *Mitos Pribumi Malas: Citra Orang Jawa, Melayu dan Filipina dalam Kapitalisme Kolonial* (Jakarta: LP3ES, 1988) , hlm. 171-172.

utara pulau Jawa pada abad ke-19, Belanda merasa gembira dan juga beruntung dapat memakai tenaga buruh tanpa biaya ataupun dengan biaya sangat rendah, dan menerima penyerahan-penyerahan produk tanpa pembayaran atau dengan pembayaran yang jauh di bawah biayanya.⁴²

Mengenai perdagangan ini, ada suatu hal yang sangat menarik yang berkaitan dengan "budaya Jawa". Dalam bidang perdagangan, orang Jawa memiliki etika dagang yang seringkali sulit untuk dimengerti oleh masyarakat yang memiliki budaya lain, terlebih lagi orang Barat. Dalam berdagang, orang Jawa pada waktu itu, menganut suatu prinsip *tuna sathak, bathi sanak*. Artinya, mereka melakukan perdagangan bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi terutama adalah mencari persaudaraan. Dengan demikian, seharusnya seseorang tidak perlu merasa heran, kalau seseorang membeli suatu barang, terutama hasil pertanian, kemudian diberi jauh lebih banyak daripada yang seharusnya dia terima.

Para pengusaha perkebunan dan kontraktor sejak dasawarsa 1840-an ke atas mengatakan, bahwa buruh upah bekerja lebih baik dan lebih efisien daripada buruh paksa. Menurut van Niel, hal ini pasti benar jika diingat pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka. Akan tetapi, pada akhir dasawarsa 1850-an, usaha-usaha untuk memasukkan buruh tani ke dalam daerah yang biasanya dikerjakan oleh buruh rodi, harus ditinggalkan karena tidak ada kaum buruh yang bersedia bekerja dengan tingkat upah yang dijanjikan pemerintah. Sebagian besar kaum tani Jawa tidak belajar menghargai pekerjaan sebagai alat untuk men-

⁴² Robert van Niel, *op. cit.*, hlm. 132.

capai tujuan, melainkan tetap memandang pekerjaan sebagai beban yang harus dipikul dan dideritakan. Penambahan jumlah kerja paksa yang memberatkan di seluruh daerah penduduk yang lebih luas, mungkin membuka mata para petani cara bagaimana bekerja di perkebunan-perkebunan baru. Akan tetapi hal ini tidak merangsang minat perorangan maupun dalam tanam-an ekspor, karena pandangan petani Jawa terhadap pekerjaan tetap tidak berubah.⁴³

Hubungan kerja yang kurang serasi antara pengusaha dan buruh tani, sebenarnya suatu hal yang biasa terjadi, bahkan sampai masa sekarang. Di satu pihak, buruh berusaha mendapat upah yang sebesar-besarnya, dengan kerja seringan-ringannya. Di pihak lain, pengusaha berusaha mendapat keuntungan sebesar-besarnya, dengan modal sekecil-kecilnya. Dengan adanya perbedaan tujuan ini, sudah barang tentu menimbulkan konflik kepentingan. Mengenai terjadinya konflik ini, menurut Marx, kaum kapitalis, yaitu pemilik pribadi alat-alat produksi, merampas nilai lebih dari apa yang telah diciptakan oleh manusia dengan kerjanya dan memberikan kaum pekerja tidak lebih dari yang dibutuhkan untuk menjaga hidupnya. Konsekuensinya, menurut Marx, selalu ada dua kelas utama yang bertentangan satu sama lain dalam setiap masyarakat tertentu, yang menguasai alat-alat produksi dan yang lain hanya mempunyai kemampuan kerja.⁴⁴

Hadirnya mesin-mesin produksi di dalam suatu pabrik, telah mengakibatkan pengaruh tersendiri. Menurut Daldjoeni, suasana teknik yang dimiliki manusia

⁴³ *Ibid.*, hlm. 113.

⁴⁴ Maurice Duverger, *Sosiologi Politik* (Jakarta: C.V. Rajawali, 1981), hlm. 210.

ikut menentukan struktur hubungan antar manusia. Di suatu pabrik dengan *massa* buruhnya yang menyajikan produksi untuk pemasaran yang tak dikenal. Hubungan buruh dengan majikan atau buruh dengan buruh, lain sekali dari di suatu pertukangan kecil yang bekerja tanpa mesin. Tata kerja manusia kota selain dilayani oleh kemajuan teknik, juga diatur oleh jaringan transportasi dan komunikasi yang serba mekanistik. Industrialisasi mampu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan material.⁴⁵

Pendapat Daldjoeni ini, mungkin benar untuk masa awal tumbuhnya industrialisasi di negara-negara sedang berkembang. Namun pendapat ini tidak lagi relevan, manakala industrialisasi sudah semakin maju. Terbukti sekarang, industrialisasi justru menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang sangat tidak diharapkan. Timbulnya pencemaran lingkungan akibat industrialisasi, ternyata justru telah menimbulkan penderitaan umat manusia, yang penanggulangannya memerlukan biaya yang tidak kecil.

"Modernisasi" pabrik-pabrik gula di Jawa sejak tahun 1830 dan tahun 1860-an, dapat dilihat dengan jelas dari Tabel X berikut ini:

⁴⁵ N. Daldjoeni, *Seluk Beluk Masyarakat Kota* (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 18.

Tabel X : Biaya Pembangunan Pabrik-Pabrik Gula Menurut Teknik Produksi Yang Berbeda-Beda Pada Tahun 1830-1860 Dalam Ribuan Gulden (F)

Teknik Produksi	Milik Pemerintah				Milik Swasta			
	1830		1860		1830		1860	
	Gdg	Msn	Gdg	Msn	Gdg	Msn	Gdg	Msn
a. Tradisional	38	19	-	-	20	19	-	-
b. Lebih modern	-	-	49	58	-	-	25	58
c. Eropa	-	-	56	46	-	-	29	49
d. Mutakhir	-	-	93	160	-	-	40	80

Keterangan : Angka-Angka itu merupakan hasil kalkulasi yang didasarkan pada ukuran rata-rata; Pabrik-Pabrik kontraktor kira-kira dua kali lebih besar dibanding dengan pabrik swasta.

LB = Diperbaharui dalam pengertian teknik

B = Meliputi silinder tekanan dan mesin uap

Mutakhir (Teknik d) = Berarti penggunaan ketel uap yang lebih luas untuk tujuan pemutaran maupun perlengkapan sentrifugal

Gdg = Gedung

Msn = Mesin

Sumber: Pieter Creutzberg dan J.T.M. Van Laenan (ed). *Sejarah Statistik Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1987.) hlm. 273 dan 275.

Pembaharuan guna meningkatkan produksi gula, juga terjadi di pabrik-pabrik di Kabupaten Kendal. Di Pabrik Puguh dan Gemuh, cara pengelolaan yang semula mempergunakan cara lama, pada tahun 1860

dan 1861, para pengusaha mulai mempergunakan cara baru. Di pabrik gula Cepiring, salah satu dari tiga mesin silindernya, digerakkan dengan tenaga uap yang berkekuatan 8-10 tenaga kuda, sedangkan yang dua lagi masih menggunakan tenaga air. Adapun upah yang diberikan kepada setiap pekerja dengan perantaraan penguasa, untuk setiap pabrik ditetapkan 18 sen per hari.⁴⁶

Diterapkannya mekanisasi dalam industri gula, diperlukan penyesuaian-penyesuaian. Hal ini terjadi mengingat dalam industri yang menggunakan mesin-mesin produksi, memerlukan pola kerja yang berbeda dengan pola kerja yang sebelumnya dikenal buruh. Disamping dapat membawa kemajuan produksi, mekanisasi juga menimbulkan berbagai kerugian. Menurut Daldjoeni, kerugian dari mekanisasi terletak pada *tempo*. Manusia dengan bekal struktur psikis dan sikap hidupnya, pada dasarnya sulit untuk menyesuaikan diri dengan *tempo* tersebut. Manusia kota jadi semakin sulit untuk melepaskan diri dari cengkaman *tempo* kehidupan mekanistik, karena mekanisasi memang dibutuhkan demi kelestariannya.⁴⁷

Menurut Geertz, industri gula di Jawa berbeda dengan industri gula di Jamaika. Industri gula di Jawa tidak dibangun di atas landasan budak belian impor yang tidak punya tradisi petari. Berbeda dengan di Puerto Rico misalnya, industri gula itu tidak memaksa kaum tani yang baru melembaga untuk digiring masuk ke perkebunan *enclave*, dan menurunkan derajat mereka menjadi angkatan kerja yang tidak memiliki tanah, sepenuhnya jadi kaum proletar. Buruh tebu di

⁴⁶ *Kultuur Archief 1858*.

⁴⁷ N. Daldjoeni, *op. cit.*, hlm. 18.

Jawa adalah tetap petani yang berorientasi komunitas dan sekaligus juga buruh upahan. Kakinya yang sebelah tertancap di lumpur sawah, yang sebelah lagi menginjak lantai pabrik.⁴⁸

Ada seorang pejabat tinggi yang mengatakan bahwa, di bawah Sistem Tanam Paksa itu, kaum tani diharuskan bekerja 4 atau 5 kali lebih lama dari jumlah jam kerja yang dituntut dalam masa sebelum 1830. Pada umumnya imbalan yang diterima oleh kaum tani itu dalam bentuk hasil budidaya tanaman atau upah, yang sama sekali tidak seimbang dengan tambahan waktu dan jerih payah yang dituntut dari mereka, dan juga di bawah harga pasaran dari hasil budidaya itu. Berkenaan dengan hasil budidaya tanaman ekspor yang ditanam di tanah desa, imbalan yang diterima jauh dibawah nilai pendapatan yang diperoleh andai-kata tanahnya itu dipakai untuk tanaman pangan.⁴⁹

Adanya akibat buruk dari Sistem Tanam Paksa di suatu daerah, tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur bahwa Sistem itu selalu mengakibatkan penderitaan bagi para petani. Akibat Sistem Tanam Paksa sebenarnya tidak selalu sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, bahkan antara pabrik yang satu dengan pabrik yang lain. Menurut Burger, sebagai contoh dari padanya, ialah Jepara dan Pasuruan. Keadaan di daerah Karesidenan Jepara sangat buruk. Dalam tahun 1840 terdapat tekanan yang berat dari banyaknya rodi dan pekerjaan penanaman tebu, nila, teh, kopi, dan untuk penambangan kayu, selain itu terdapat pula pungutan-pungutan dalam bentuk uang. Untuk penanaman tebu dalam perkebunan

⁴⁸ Clifford Geertz, *op. cit.*, hlm. 94

⁴⁹ R.E. Elson, *op. cit.* hlm. 45-56.

besar, orang harus bekerja sampai 15 atau 30 *pal*. Dengan demikian, penduduk ada yang mentelantarkan tanah-tanah pertanian mereka sendiri tidak punya waktu untuk memotong padi pada Karesidenan-Karesidenan lain. Karena itu, dalam pertengahan pertama tahun 1841, kira-kira 2.000 orang penduduk pindah ke Grobogan, dan pada waktu kemudian lebih banyak lagi. Setelah diambil tindakan-tindakan perbaikan, maka penduduknya bertambah lagi. Dalam tahun 1850 orang masih mengeluh tentang terlalu besarnya penanaman yang dipusatkan, sebab orang harus bekerja menempuh jarak yang terlalu jauh. Segala kerja paksa itu, diberi imbalan upah yang tidak cukup.⁵⁰

Ketika kemudian semasa tenaga bebas muncul di perusahaan-perusahaan gula, pekerjaan ini untuk sebagian besar dilakukan oleh golongan rakyat yang terdiri dari pengembara. Pada tahun 1853 berita tentang mereka, bahwa mereka terdiri dari "segala macam orang yang datangnya dari karesidenan lain; tak jarang setelah tersangkut perkara-perkara polisi". Dari mereka tidak bisa di harapkan banyak, jumlahnya selalu berganti-ganti dan tidak tetap. Pada tahun 1866, sebagian besar dari tenaga perusahaan masih terdiri dari pengembara. Dr. Levert dalam tesisnya, memberikan keterangan tentang hal itu. Pengembara itu paling banyak bekerja sebagai kuli potong. Sebelum perangnya, di antara pekerja itulah yang paling banyak jumlah "bajingan" pengembara.⁵¹

Ketidakpastian memperoleh tenaga kerja, telah mendorong pengusaha pabrik untuk menerapkan kerja

⁵⁰ D.H. Burger, *Sedjarah.....op. cit.*, hlm 199.

⁵¹ D. H. Burger, *Perubahan..... op. cit.*, hlm. 101

bebas, dengan member uang muka. Namun demikian, hal ini juga ternyata juga mendapat kesukaran. Sebab penduduk yang sudah mendapat uang muka, sering kali tidak menepati perjanjian-perjanjian, bahkan mereka bekerja pada majikan yang lain lagi, dengan harapan memperoleh gaji yang lain lagi.

Upah yang diterima tiap penduduk, berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, bahkan juga antara pabrik yang satu dengan pabrik yang lain. Untuk perkebunan gula (tebu) di Kabupaten Kendal, pihak penguasa menyediakan tenaga-tenaga pemotong. Untuk pabrik Puguh dan Gemuh, masing-masing 225 orang tenaga pemotong, sedangkan untuk pabrik Kaliwungu 250 orang, dan pabrik Cepiring 300 orang setiap harinya. Tenaga pemotong ini diperlukan untuk mencukupi kebutuhan saja, jadi tidak ada hubungannya dengan luas tanah perkebunan. Tenaga-tenaga pemotong ini minta upah 25 sen untuk pekerja siang, dan 30 sen untuk pekerjaan malam hari. Upah ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang hanya 20 sen dan 25 sen.⁵²

Pada tahun 1864, untuk pabrik Puguh dan Gemuh, dicukupi dengan tenaga kuli 250 orang, tetapi setahun kemudian (1865) dikurangi menjadi 225 orang. Pada permulaan musim giling, jumlah tenaga kerja untuk setiap pabrik dikurangi dengan 25 orang, dari jumlah tenaga kerja yang telah ditetapkan pada musim giling tahun sebelumnya. Jika benar-benar dibutuhkan, kepada orang-orang yang telah ditunjuk, atas permohonan pemilik pabrik, diperkenankan untuk menambah tenaga kerja. Berdasarkan Surat Direktur Perkebunan tanggal 28 Juli 1865 No. 2980/20 telah

⁵² *Nota Inspektur Perkebunan di Afdeeling 2.*

dicukupi. Tentang hal ini, telah diadakan penelitian, dan dari keterangan yang telah diperoleh, tidak ada hal-hal yang kurang wajar atau penyalahgunaan dari pihak pabrik, terhadap tenaga-tenaga yang diperoleh. Para tenaga kerja tidak dipekerjakan pada pekerjaan-pekerjaan yang terlalu berat, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai.⁵³

Berkaitan dengan industri gula dan produksinya, di kota Semarang yang menjadi pintu gerbang ekspor gula dari Kabupaten Kendal, telah didirikan sebuah gudang penyimpanan gula. Gudang ini milik Mayor Tan Tiang Cing, yang membeli *persil* tanah dan mendirikan gudang di tanah itu. Gula yang disimpan dalam gudang, adalah hasil produksi pabrik miliknya. Didirikannya gudang gula di tempat itu, menyebabkan kampung tempat didirikannya gudang gula itu, kemudian disebut "Gedong Gula".⁵⁴ Selain itu, mengingat Semarang juga merupakan pintu gerbang ekspor-impor di Propinsi Jawa Tengah dan daerah "*vorstenlanden*" (daerah kerajaan Yogyakarta-Surakarta), maka di daerah pelabuhannya juga memiliki banyak gudang penyimpanan komoditas ekspor-impor. Di antara komoditas Ekspor yang banyak menggunakan jasa pergudangan, adalah gula. Hal ini disebabkan karena gula merupakan "primadona" ekspor dari Hindia Belanda.

4.4 Sarana dan Prasarana Transportasi

Tumbuhnya industri gula yang semakin pesat, telah menimbulkan berbagai kendala yang harus segera

⁵³ *Nota Inspektor Perkebunan di Afdeeling 2.*

⁵⁴ Hartono Kasmadi dan Wiyono, *Sejarah sosia Kota Semarang (1900-1950)*, (Jakarta: Depdikbud, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1985), hlm. 88.

diatasi. Kendala ini khususnya menyangkut masalah transportasi yang tidak seimbang dengan pesatnya produksi gula, yang memerlukan sarana dan prasarana transportasi yang semakin besar.

Pada awal berdirinya industri gula yang masih mempergunakan alat-alat produksi yang tradisional, dengan produksi yang tidak begitu besar, pengangkutan gula yang tidak begitu besar, pengangkutan gula dari beberapa daerah gula ke kota Semarang, dilakukan melalui sungai. Produksi gula dari pabrik-pabrik gula di Jepara diangkut ke Semarang dengan kapal-kapal buatan Juwana. Karena pendangkalan di muara sungai Juwana, juga karena mulai dibuatnya jaringan jalan tram Semarang-Juwana, transportasi air tersebut mengalami kemunduran.⁵⁵

Pada tahun 1770 Stavoius menamakan kali Juwana, sebagai salah satu kali (sungai) yang baik untuk pelayaran. Bila dibandingkan dengan seluruh sungai di pantai utara Jawa, kali Juwana adalah kali terbaik. Sekarang lebarnya sudah barang tentu semakin sempit, sebab pada sekitar tahun 1912 saja tinggal 40-80 meter, sehingga pada waktu itu pelayaran sudah semakin mundur. Muaranya di musim kemarau menjadi kering, dan dimusim hujan airnya tidak lebih dari 1 meter dalamnya.⁵⁶

Dari pabrik-pabrik gula di daerah Kendal pun, pada mulanya pengangkutan gula dilakukan melalui sungai (kali) bodri, yang mengalir di dekat pabrik gula Cepiring. Ke Semarang melalui laut adalah sangat berbahaya, karena gula adalah komoditas ekspor yang

⁵⁵ *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie* (ENI).

⁵⁶ P. J. Veth, *Java: Geographisch, Ethnogi, Historis* (Cetakan II, Jilid III, Harlem: De Erven F. Bohn, 1912), hlm. 474.

sangat rawan terhadap air. Di samping itu, resikonya juga besar. Ada kemungkinan perahu pengangkutnya bocor, atau tenggelam. Selain perahu, alat angkutan yang ada pada waktu itu, adalah *gerobak* (pedati). Hasil perkebunan dari berbagai daerah diangkut ke gudang penampungan yang disediakan. Pengangkutan biasanya menggunakan *gerobak* yang ditarik oleh lembu atau kuda. Hasil perkebunan yang telah terkumpul di gudang penampungan, kemudian diangkut lagi ke pelabuhan Semarang atau Cilacap dengan menggunakan perahu.

Pengangkutan gula melalui laut, adalah sangat berbahaya. Oleh karena itu, para pengusaha mengharapkan agar pengangkutan ini dilakukan lewat darat, dan dilakukan dengan sukarela. Hanya panen yang terakhir pada tahun 1859, dari pabrik gula Gemuh dimintakan pertolongan kepada pengusaha setempat. Tanpa kesukaran atau paksaan, datang orang-orang dengan hewan penarik untuk jarak 25 *pal* sampai ke Semarang, dengan bayaran 140 *duit* setiap keranjangnya. Jadi untuk dua kali keranjang seluruhnya 280 *duit*, disamping itu, dalam perjalanan kembali, *gerobak* mereka pergunakan untuk menarik material atau pengangkut barang lainnya, yang di bayar dengan jumlah yang sama. Dalam waktu yang singkat, para pemilik hewan penarik, selama 6 hari memperoleh bayaran f. 4,40.⁵⁷ Digunakan hewan sebagai alat pengangkut, menyebabkan pasar hewan di daerah Bodri tumbuh dengan pesat.

Tebu biasanya diangkut dari perkebunan ke pabrik-pabrik oleh penduduk yang membawa hewan penariknya, sedangkan *gerobaknya* disediakan oleh

⁵⁷ *Kultuur Archief 1858.*

pabrik. Untuk pemotongan dan pengikatan (*kolong*) sampai 25 batang, oleh pengusaha dibayar 1,5 *duit*. Para pemilik hewan penarik, pada umumnya menerima uang banyak. Pengangkutan tebu ini, lambat laun tidak perlu lagi mendapat campur tangan pemerintah. Orang-orang swasta yang dipercaya, yang datang kepada administrator dan telah menerima uang muka, dapat mengambil keuntungan dari uang muka yang mereka terima. Dari keuntungan ini, mereka akhirnya dapat memiliki hewan penarik. Jika tidak banyak tebu yang tersangkut ke pabrik, maka para pengusaha minta bantuan kepada pihak penguasa. Tanpa kesukaran atau paksaan, maka dapat dikumpulkan lebih banyak lagi ke pabrik. Keranjang-keranjang yang berisi gula, lalu diangkut ke pantai Korowelang, untuk selanjutnya dibawa ke Semarang melalui laut.⁵⁸

Jarak dari Puguh ke pantai Korowelang 9 *pal*. Untuk setiap keranjangnya, ongkosnya diperkirakan 45,40 dan 25 *duit* setiap *gerobak* ditetapkan oleh pabrik untuk memuat dua keranjang, sehingga mereka itu memperoleh upah yang cukup besar. Dengan demikian, penduduk datang membawa hewan penariknya. Tetapi usaha ini tidak begitu menguntungkan seperti pada tahun 1858. Pada tahun 1857, juga tidak menguntungkan.⁵⁹ Perbandingan biaya pengangkutan pada tiga tahun tersebut dapat dilihat dalam Tabel berikut:

⁵⁸ *Kultuur Archief 1858.*

⁵⁹ *Kultuur Archief 1858.*

Tabel XI : Biaya pengangkutan gula dari Pabrik dengan mempergunakan Gerobak Tahun 1857-1859 dalam Gulden.

Pabrik	1857	1858	1859
Puguh	11.310,73	21.232,24	8.222,64
Gemuh	10.694,74	15.116,37	13.793,44
Cepiring	14.099,58	22.093,83	15.426,24

Sumber: *Kultuur Archief 1858*.

Pengangkutan gula melalui laut semakin dirasakan tidak lagi memungkinkan, oleh karena itu guna memperlancar angkutan gula melalui darat, pemerintah mengadakan perbaikan sarana dan prasarana transportasi. Jaringan jalan diperluas dan diperbaiki, termasuk juga pembuatan jembatan-jembatan penghubungnya. Pengusaha-pengusaha pabrik dianjurkan untuk mengurus sendiri pengangkutan tebunya, dengan memberikan tunjangan uang. Dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana transportasi ini, maka Sistem Tanam Paksa telah menumbuhkan alat-alat transportasi, berupa jalan-jalan dan alat-alat transportasi, berupa jalan-jalan dan alat-alat angkut lainnya; yang semuanya menjadi dasar bagi pengembangan lalu-lintas umum sekarang ini.⁶⁰

Di kabupaten Kendal, setiap *onderneming* memiliki 220 sampai 390 *gerobak*. Pemilik pabrik Gula Cepiring dan Kaliwungu, biasanya membeirkan uang muka kepada para *sais* (pengendara *gerobak*) untuk membeli kerbau sebagai tenaga penariknya. Uang muka tersebut, kadang-kadang sampai berjumlah f. 60.

⁶⁰ D.H. Burger, *Sedjarah.....op. cit.*, hlm 187.

Pemilik pabrik lainnya, jarang melakukan hal demikian, atau melakukannya jika memang dianggap perlu. Biaya pengangkutan untuk pabrik gula Cepiring, Pugu, dan Gemuh sebesar 1,5 sen, sedangkan pabrik gula Kaliwungu membayar 2 sen untuk setiap ikat (*Bongkok*) tebu yang terdiri dari 25 batang. Pada umumnya, pengangkutan tebu tidaklah beryak kesulitan. Kedatangan atau berkumpulnya para pengangkut secara tetap, atau teratur di pabrik gula Cepiring masih sangat memprihatinkan. Akan tetapi, hal ini lambat-laun, tidak lagi mendapat campur tangan dari pihak pemerintah.⁶¹

Pabrik gula juga telah mendorong timbulnya usaha-usaha ekonomi yang terpenting, menurut Loekman Soetrisno, adalah tumbuhnya perusahaan perkeretaapian. Untuk mendukung ekspor gula dari pulau Jawa, Pemerintah Hindia-Belanda memberikan konsesi kepada perusahaan swasta Belanda yang ingin menanamkan modalnya pada usaha perkeretaapian di Jawa. Pada tahun 1862, pemerintah Belanda memberikan konsesi kepada satu perusahaan swasta Belanda, yakni *Nederlendsch Indisch Spoorweg* (NIS) untuk membangun rel-rel kereta api sepanjang 162 mil, yang menghubungkan daerah-daerah "patebon" di Surakarta dan Yogyakarta dengan kota pelabuhan Semarang.⁶²

Pengiriman gula ke Semarang ini, mengingat Semarang merupakan satu-satunya pelabuhan di Jawa tengah yang melakukan kegiatan pengiriman barang

⁶¹ *Nota Inspektor Perkebunan di Afdeeling 2.*

⁶² Loekman Soetrisno, *op. cit.*, hlm. 65-66.

produksi pertanian dan hasil perkebunan ke pasaran dunia, khususnya ke negara-negara Eropa Barat.⁶³

Selain "jalur selatan" ini, perusahaan perkeretaapian juga membuat jalur *Tram* yang menuju ke arah timur, yang menghubungkan Semarang-Juwana. Muncul dan berkembangnya jaringan jalan *tram* Semarang-Juwana ini, merupakan saingan berat bagi lalu-lintas air, yang pada waktu itu masih merupakan sarana penghubung antara daerah Semarang dan sekitarnya. Kemunduran lalu-lintas air juga disebabkan oleh terjadinya pendangkalan muara-muara sungai, yang sebelumnya dapat dilayari.⁶⁴

Tram yang menghubungkan Semarang-Juwana ini, milik maskapai swasta Belanda "*Samarang-Joana Stoom-traam Masstschappij*" (SJS), yang membangun jalan *tram* pertama di Jawa. Jalur utama yang dibangun oleh SJS adalah dari Semarang ke Juwana, sepanjang 87,5 kilometer. Dalam perkembangan lebih lanjut, SJS juga membangun dan mengelola jalur jalan cabang di daerah-daerah di sekitar jalur utama. Jalur jalan *tram* dari Semarang ke Juwana ini, untuk selanjutnya diutamakan bagi komunikasi dan transportasi antara daerah setempat.⁶⁵

Pada bulan pertama dibukanya jalur jalan *tram* ini untuk kaum umum, SJS telah mengangkut penumpang sebanyak 55.553 orang, terdiri dari 6185

⁶³ Suhartono, 'Transportasi dan Perkembangan Jawa Tengah', dalam: *Bulletin Yaperna*, No. 17, Th. III, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1977), hlm. 22.

⁶⁴ *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie* (ENI), (Jilid I, cetakan II, 's-Gravenhage; martinus Nijhoff, 1917), hlm 622.

⁶⁵ Djoko Suryo, *Social and Economic life in Rural Semarang under colonial rule in the Later 19th Century* (thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy at Monash University, December 1982), hlm. 135.

penumpang kelas I, dan 49.368 penumpang kelas II.⁶⁶ Daerah-daerah yang terletak sepanjang jalur kereta api ini, menjadi lebih ramai dan bahkan mulai tumbuh menjadi kota-kota kecil. Pasar-pasar mulai bermunculan, dan segera menjadi pusat aktivitas perdagangan dan komunikasi bagi desa-desa di sekitarnya. Jaringan jalan kereta api ternyata juga menjadi perangsang bagi para pedagang di daerah pedalaman, untuk meningkatkan kegiatannya dan menghubungkan kegiatan ekonomi pedesaan dengan daerah pemasaran yang lebih luas, seperti Semarang dan kota-kota kecil lainnya.⁶⁷ Mengenai tumbuhnya desa-desa baru ini, dapat dilihat dalam peta IV.

Berkembangnya daerah-daerah pedalaman menjadi kota-kota kecil yang ramai, biasanya diikuti oleh munculnya beberapa pasar yang selanjutnya menjadi pusat kegiatan perdagangan dan pusat komunikasi bagi masyarakat setempat. Ternyata dengan adanya jaringan jalan *tram*, tidak hanya mempengaruhi perkembangan jalan-jalan di pedalaman, tetapi juga telah merangsang tumbuhnya pasar-pasar dan desa-desa baru. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, munculnya jalan kereta api juga telah merangsang tumbuhnya sektor formal dan informal yang memacu pertumbuhan ekonomi penduduk setempat. Beberapa desa yang semula sama sekali tidak dikenal, setelah ada jaringan jalan kereta api kemudian tumbuh menjadi desa yang terkemuka.⁶⁸

⁶⁶ *Statuten van de Naamlouoze Venootschap Samarang-Joana Stoomtram-maatschappij*, 1882, hlm. 10.

⁶⁷ Djoko Suryo, *op. cit.* hlm. 152.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 156. Lihat pula: Sartono Kartodirjo, et.al, *Sejarah Nasional Indonesia* (jilid V, Jakarta: Balai Pustaka, 1977) hlm. 98.

BAB IV

KESIMPULAN

Sebelum diterapkannya Sistem Tanam Paksa di Jawa, penduduk pulau Jawa hidup dalam suatu harmoni dalam ikatan adat, ikatan desa, dan ikatan feodal. Ikatan-ikatan ini merupakan pranata sosial yang mengatur masyarakatnya berperilaku sebagai makhluk individu, dalam kehidupan bermasyarakat, "berbangsa" dan "bernegara". Dalam ikatan ini tercakup juga hak dan kewajiban seseorang agar tercapai suatu kehidupan yang "*tata tentrem karta raharja*", suatu tatanan sosial yang dicita-citakan oleh seluruh warganya. Akan tetapi, keadaan ini selanjutnya mengalami perubahan dengan datangnya bangsa Belanda ke "Indonesia".

Kedatangan bangsa Belanda yang semula bermaksud mencari barang dagangan yang laku di pasaran Eropa, ternyata kemudian justru berusaha untuk menghasilkan berbagai jenis tanaman untuk komoditas ekspor. Agar hasil tanaman ini dapat memenuhi banyaknya jumlah permintaan di pasaran Eropa, maka

diterapkannyalah Sistem Tanam Paksa di Jawa. Salah satu dari berbagai jenis tanaman paksa yang waktu itu sangat laku dan menguntungkan adalah tebu.

Meningkatnya jumlah permintaan gula di pasaran dunia, menyebabkan industri gula dengan perkebunan tebunya mengalami kemajuan pesat. Pabrik-pabrik gula tumbuh dengan pesat menjadikan gula sebagai komoditi utama dan pertama yang berupa "barang jadi". Adapun jenis komoditas ekspor lainnya di ekspor dalam bentuk "barang mentah" atau "setengah jadi". Tampilnya industri gula yang mempergunakan mesin-mesin produksi telah menjadi dasar bagi tumbuhnya "industrialisasi" di Jawa khususnya, dan "Indonesia pada umumnya. Selain itu, tumbuhnya perkebunan besar tebu di pulau Jawa telah pula memberikan dimensi baru kepada petani, bahwa pola pertanian yang selama ini dilakukannya jauh tertinggal, bila dibandingkan dengan perkebunan besar. Sebab budi-daya tanaman tebu pemerintah, dilakukan dengan cara "intensifikasi" pertanian, melalui pemupukan, pemeliharaan, bibit unggul, dan irigasi yang baik. Hal ini sekaligus membuka kesadaran petani, bahwa komersialisasi pertanian sebenarnya merupakan sektor yang sangat menguntungkan.

Adanya larangan pemilik pabrik memiliki tanah pertaniannya sendiri, maka dalam budidaya tanaman tebu ini, digunakan tanah-tanah sewa milik para petani. Digunakannya sawah milik petani dengan sistem sewa, secara langsung maupun tidak, telah menyebabkan melemahnya ikatan adat, ikatan desa maupun ikatan feodal yang ada. Hubungan antara *Patron-client* yang selama beratus tahun menjadi bagian dari kehidupan petani, semakin hilang. Petani penggarap ti-

dak lagi tergantung kepada "tuan tanah" di desanya, karena mereka dapat bekerja dan menggantungkan hidupnya kepada "tuan"-nya yang baru, yakni pemilik pabrik gula dengan perkebunan tebunya. Semakin melemahnya ikatan-ikatan ini berarti semakin melemahnya nilai-nilai gotong-royong yang juga menjadi ciri khas kehidupan di desa. Sementara itu tumbuhnya kerja bebas dengan upah telah menyebabkan komersialisasi dan individualisasi masyarakat pedesaan. Desa yang semula merupakan tempat tinggal yang nyaman berangsur-angsur berubah berganti dengan kesibukan kerja di perkebunan-perkebunan tebu dan pabrik gula.

Dengan adanya industri gula yang mempergunakan sistem administrasi kepegawaian yang "maju" dengan pola kerja yang baru, telah menjadi dasar bagi "sistem dan hubungan kerja" yang sekarang banyak diterapkan di dalam perusahaan-perusahaan. Bekerja di pabrik gula dengan perkebunan tebunya, berbeda sekali dengan bekerja di sawah atau ladang yang biasa dilakukan oleh para petani. Bekerja di pabrik dan perkebunan tebu, memerlukan disiplin kerja yang lebih tinggi, dengan jam kerja yang tepat, tertib dan terukur, tetapi dengan gaji yang teratur pula. Selain itu, pabrik dengan mesin-mesin produksinya, memerlukan keterampilan dan kerjasama yang lebih baik.

Diberikannya upah kerja dalam bentuk uang menyebabkan uang menjadi prasarana penunjang kehidupan ekonomi petani. Uang sebagai alat tukar telah mampu membangkitkan gairah kerja penduduk desa. Uang berhasil menjadi "idola" baru dalam kehidupan petani. Membudayanya uang di lingkungan masyarakat pedesaan memberikan kemudahan-kemudahan baru. Dengan uang seseorang akan dapat melakukan kegiatan-

an perdagangan dengan lebih leluasa. Untung dan rugi sudah menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam kegiatan perekonomiannya. Ekonomi uang juga telah mampu memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan sampai jauh di pedalaman, khususnya mereka yang terlibat dalam mata rantai perdagangan di Kabupaten Kendal.

Dalam industri gula dipergunakan mesin produksi yang digerakan dengan tenaga air, maupun tenaga uap. Adanya pabrik gula yang mempergunakan tenaga uap, sudah barang tentu diperlukan banyak sekali bahan bakar, yang berupa kayu dari berbagai jenis pepohonan. Guna memenuhi kebutuhan kayu bakar ini, penduduk dipaksa dan terpaksa melakukan penebangan pohon di sekitarnya. Bila pohon yang ada di sekitarnya telah habis, mereka mulai menebang pohon di lereng-lereng gunung. Hal ini membawa dampak negatif terhadap pelestarian lingkungan maupun pelestarian alamnya. Timbulnya bencana banjir di berbagai daerah di Jawa, khususnya di daerah tebu, penyebabnya tidak lain adalah penggundulan hutan oleh pabrik-pabrik gula.

Diterapkannya Sistem Tanam Paksa di pulau Jawa, akibatnya tidak selalu sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Hal ini bukan saja disebabkan adanya perbedaan geografis, tetapi juga disebabkan karena adanya perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Pada mulanya, hampir semua jenis tanaman paksa mengakibatkan timbulnya penderitaan dan kesengsaraan rakyat. Hal ini timbul akibat terjadinya "*cultural shock*", antara kebiasaan lama dengan kebiasaan baru, merupakan hal yang biasa terjadi. Akan tetapi, setelah segala sesuatunya

menjadi *mapan*, terbukti bahwa di beberapa daerah tanam paksa tebu justru membawa dampak yang positif terhadap kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Seperti di Kendal misalnya, industri gula ternyata justru membawa kemajuan yang mampu memacu perkembangan sosial-ekonomi masyarakat. Industri gula dengan perkebunan tebunya, telah mampu menyerap banyak tenaga kerja. Di beberapa daerah, industri gula bahkan telah mampu menampung perusuh dan pengembara yang waktu itu merajalela. Dengan tertampungnya golongan ini, selain memberikan matapencaharian, sekaligus juga mengurangi jumlah angka kriminalitas, sekalipun hanya untuk sementara. Mengenai kemiskinan yang banyak dibicarakan oleh berbagai ahli, sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, tanpa adanya Sistem Tanam Paksapun, penduduk pedesaan di Jawa memang miskin, justru karena kemiskinannya itulah yang menyebabkannya menjadi petani, dan bukan *priyayi*.

Industri gula dengan perkebunan tebunya, memerlukan prasarana dan sarana penunjang lainnya. Guna mengairi perkebunan tebunya, pemilik pabrik gula telah membuat bendungan-bendungan dan saluran irigasinya. Adanya saluran irigasi ini, ternyata juga dapat dimanfaatkan oleh para petani untuk kepentingan pertaniannya. Selain itu, guna pengangkutan produksi gulanya, pemilik pabrik memerlukan sarana dan prasarana perhubungan yang lebih baik. Untuk memenuhi kebutuhan ini, telah pula dibuat jembatan-jembatan, jalan-jalan besar, dan juga sarana angkutan seperti *gerobak* dan juga perahu, yang memberkan lapangan kerja baru bagi penduduk. Setelah sarana angkutan ini dirasa sudah tidak memenuhi syarat lagi,

maka diadakanlah kereta api sebagai alat pengangkutnya.

Kalau tumbuhnya perkeretaapian di Jawa disebabkan karena adanya industri gula, maka tumbuhnya pusat keramaian atau kota-kota kecil baru di sepanjang jalur kereta api dapat dianggap sebagai akibat dari tumbuhnya industri gula. Tumbuhnya kota-kota kecil ini, membuktikan bahwa industri gula dengan perkebunan tebunya membawa dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adanya jalur jalan kereta api telah menumbuhkan mata pencaharian baru baik dalam sektor formal maupun informal. Selain itu, adanya angkutan kereta api ini, membawa akibat semakin meningkatnya mobilitas sosial masyarakat baik yang vertikal maupun yang horizontal. Memang benar bahwa, ekonomi kapitalisme Belanda padat modal, dan ekonomi pribumi padat karya. Akan tetapi, tidaklah benar bahwa kedua sistem ekonomi ini terpisah satu sama lain sehingga dapat disebut "dualisme ekonomi" seperti yang dikemukakan oleh Boeke. Antara ekonomi pribumi dan ekonomi kapitalis, selain saling berhubungan juga terjadi saling ketergantungan. Jadi tidak ubahnya dengan adanya PMA (Penanaman Modal Asing) yang sekarang juga banyak bergerak dalam berbagai bidang industri di Indonesia, yang keduanya saling menguntungkan. Adanya penduduk yang bekerja pada pabrik-pabrik gula, secara langsung maupun tidak, lambat laun juga menyebabkan terjadinya "alih teknologi" sehingga bangsa Indonesia kemudian juga mampu mengelola industri gula yang ditinggalkan oleh Belanda. Terlibatnya penduduk dalam matarantai produksi dan perdagangan internasional, membuktikan bahwa ekonomi yang padat karya juga menjadi bagian

yang tak terpisahkan dalam ekonomi yang padat modal, karena sesungguhnya tenaga kerja adalah bagian dari faktor produksi itu sendiri.

Industri gula yang pernah "berjaya" dan menjadi gabus yang mengapungkan pulau Jawa", kini telah berlalu. Namun demikian, sejaah telah mencatat bahwa, "Indonesia" pernah menjadi salah satu "negara" pengekspor gula terbesar di dunia. Industri gula yang telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai sektor kehidupan penduduk di pedesaan Jawa, ternyata juga telah membawa akibat terjadinya "demokratisasi" kehidupan masyarakatnya.

DAFTAR SUMBER

- A. *Arsip* :
- Algemeen Verslag der Residentie Semarang over het jaar 1854*, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
 - Nota van de Inspecteur der Kutures in de 2 afdeeling* (Nota Inspektor Perkebunan di Afdeeling 2), Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
 - Kultuur Archief 1858*, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
 - Kultuur Archief 1861*, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- B. *Buku*:
- Abdullah, Taufik dan Abdurrachman Suryamihardjo (eds.), *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*, Jakarta: P.T. Gramedia, 1985.
 - Alatas, S.H., *Mitos Pribumi Malas: Citra Orang Jawa, Melayu dan Filipina dalam*

- Kapitalisme Kolonial*, Jakarta: LP3-ES, 1988.
- Alfiah (ed.), *Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai*, Jakarta: Pulsar Yayasan Ilmu Sosial, 1980.
- Amaluddin, Moh., *Kemiskinan dan Polarisasi Sosial: Studi Kasus di Desa Bulugede Kabupaten Kendal-Jawa Tengah*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1987.
- Anon, *Memori Serah Jabatan 1921-1930*, Jakarta: Arsip Nasional, 1977.
- Anon, *Sejarah Daerah Jawa Tengah*, Jakarta: Depdikbud, 1978
- Anon, *Statuten van de Naamlouze Venootschap Samarang-Joana Stoomtrammaatschapij*, 1882.
- Breman, Jan., *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja: Jawa di Masa Kolonial*, Cetakan I, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Burger, D.H., *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Terjemahan Prayudi, Jilid I, Cetakan Kedua, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- _____. *Perubahan-Perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa* Jakarta: Bhratara, 1977.
- Chambers, Robert., *Pembangunan Desa, Mulai dari Belakang*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Cruetzberg, Pieter dan J.T.M van Lennen (eds), *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987

- Daldjoeni, N., *Seluk Beluk Masyarakat Kota Bandung*: Alumni, 1979
- Daldjoeni, N. dan Soeyitno., *Pedesaan Lingkungan dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1979
- Elson, R.E., *Javanese Peasants and the Colonial Sugar Industry: Impact and Change in an East Java Residency, 1830-1940*, Oxford, New York, Singapore: Oxford University Press, 1984.
- Encyclopedie van Nederlandcshe-Indie* (ENI), Jilid I-IV Cetakan Kedua, s'-Grevenhage: Martinus Nijhoff., 1917-1920.
- Geertz, Clifford., *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, Cetakan Kedua Jakarta: Bhratara, 1983.
- _____, *Abangan, Santri Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Cetakan I, Jakarta: Pustaka Jaya, 1985.
- Huender, W., *Overzicht van den Economischen der Toestand der Inheemse Bevolking van Java en Madoera 's*, Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1921.
- Hunter, Guy., *Modernizing Peasant Societies: A Comparative Study in Asia and Africa*, New York, London: Oxford University Press, 1969.
- Kasmadi, Hartono, dan Wiyono (eds.), *Sejarah Sosial Kota Semarang (1900-1950)*, Jakarta: Depdikbud, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1985

- Kartodirdjo, Sartono (ed.), *Masyarakat Kuno dan Kelompok-Kelompok Sosial*, Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1977.
- _____ (ed.), *Elite Dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: LP3ES, 1983.
- _____ (ed.), *Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial*, Cetakan I, Jakarta : LP3ES, 19984.
- Keeler, Suzanne., *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit Penentu dan Masyarakat Modern*, Jakarta: C.V. Rajawali, 1984.
- Lenski, Gerhard E, *Power and Privilege: A Theory of Social Stratification*, New York/St. Louis/San Francisco/Toronto/Sydney: Mc Graw-Hill Book Company, 1966.
- Manning, Chris dan Tadjuddin Nor Effendi (eds.), *Urbanisasi, Pengangguran, Dan Sektor Informal Di Kota*, Jakarta: P.T. Gramedia, 1985.
- Martono, Soemarsaid, *State And Statecraft in Old Java: A Study of Later Mataram Period 16th to 18th Century*, Monograph Series. Modern Indonesia Project South East Asia Program, Department of Asia Studies, Cornell University, Ithaca, New York, Reprinted, 1974.
- _____, *Negara Dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa Mataram II Abad XVI sampai XIX* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.

- Mulder, Niels., *Kebatinan Dan Hidup Sehari-Hari Orang Jawa: Kelangsungan dan Perubahan Kultura*, Jakarta: P.T. Gramedia, 1984.
- Nagazumi, Akira (ed.) *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang*, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 1966.
- Paloma, Margeret M., *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: C.V. Rajawali, 1984.
- Sayogyo (ed.), *Ekologi Pedesaan: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: C.V. Rajawali, 1982.
- Shelteme, A.M.P.A, *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, Cetakan I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Scott, James C., *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan, dan Subsistensi di Asia Tenggara*, Cetakan II, Jakarta: LP3-ES, 1983.
- Shanin, Teodor (ed.), *Peasants and Peasant Societies*, Aylesbury, Bucks: Hazel Watson and Viney Ltd, 1973.
- Sosrodihardjo, Soedjito, *Perubahan Struktur Masyarakat Jawa: Suatu Analisa* Yogyakarta: Penerbit Karya, 1963.
- Soedarsono, Djoko Soekiman dan Retna Astuti (eds.), *Peranan Daerah dalam Pembentukan Kebudayaan Nasional*, Proyek Penelitian dan Pengkajian Budaya Nusantara (Javanologi), Direktorat Jenderal Kebudayaan, Depdikbud 1985.
- Suwarno, P.J., G. Mudjant, dan Suhardjo Hatmosuprobo (eds.), *Sejarah dalam Monografi*, Yogyakarta: Jurusan Seja-

rah dan Geografi IKIP Sanata Dharma, 1980.

Suryo, Djoko., *Social and Economic Life in Rural Semarang under Colonial Rule in the Later 19th Century*, Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy at Monash University, December, 1982.

Tjondronegoro, Soediono, M.P. dan Gunawan Wiradi (eds.), *Dua Abad Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Jakarta: P.T. Gramedia, 1984.

Veth, P.J., *Java: Geograpisch, Ethnologisch, Historisch*, Jilid II-IV, Cetakan Kedua, Harlem: De Erven F. Bohn, 1912.

C. *Majalah/Makalah/Surat Kabar/Buletin:*

Agro Ekonomika, No. 21 Tahun XIV, Agustus 1983.

Agro Ekonomika, No. 23 Tahun XVI, Desember 1985.

Bulletin Yaperna, No. 17, Tahun III.

Prisma, No. 8, 1984, No. XIII.

The Developing Economies, Vol. XVIII, No. 1, March 1980.

Gunawan Wiradi, 'Desa dalam Perspektif Sejarah' dalam *Makalah*, Yogyakarta: PAU Studi Sosial, Universitas Gadjah Mada, Tanggal 10-11 Februari 1988.

Kompas, 2 Januari 1989.

Kompas, 1 Juli 1989.

